SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pegendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RENJA PD

Pasal 2

Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berkenaan yang memuat penjabaran dari RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat;

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;
e. Penutup; dan
f. lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renja PD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026 yang akan digunakan PD untuk melaksanakan Rencana Kerja PD;

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk:
   a. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan serta evaluasi hasil capaian pelaksanaan rencana kerja PD tahun lalu dan capaian kinerja pelayanan PD;
   b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD;
   c. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran PD yang telah ditetapkan pagu dan indikatifnya; dan
   d. mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Pasal 5

(1) Renja PD digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan RKA PD.

(2) Renja PD selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung yang mengatur mengenai Renstra PD Tahun 2021-2026.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah pelaksanaan Renja PD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam Renja PD meliputi;

a. Semua ketetapan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
b. Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD; dan

d. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan pada saat penyusunan perubahan Renja PD.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah membuat laporan realisasi kinerja dan anggaran secara berkala atas pelaksanaan Renja PD.
(2) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan relaisasi kinerja dan anggaran Renja PD disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektonik.
(5) Dalam hal pelaporan secara elektronik terjadi kendala atau permasalahan teknis maka dapat disampaikan secara manual.
(6) Laporan realisasi kinerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan tahun berikutnya dan/ atau perubahan Renja PD tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD dan evaluasi hasil Renja PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

(2) Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitan dan pengembangan Daerah melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan PD terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.

(3) Kepala PD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renja PD.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Pengendalian pelaksanaan Renja PD dilakukan pada saat penyusunan RKA PD.

BAB V
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 10

(1) Renja PD dapat diubah apabila :
   a. berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD.
   b. terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam pasal 9; dan
   c. dalam hal terjadinya penyesuaian tujuan dan sasaran PD beserta target indikatornya, sebagaimana tertuang didalam Renstra PD Tahun 2021-2026.

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan yang terdiri dari :
   a. pagu anggaran program;
   b. kegiatan dan sub kegiatan;
   c. perubahan target indikator kinerja program; dan
   d. kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada hasil pelaksanaan dan evaluasi Renja PD tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 107

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5894558 Fax. (022) 5894558 Soreang 40911

Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, Email : disperin@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 800 / Kep.387 - Sekr / 2024

Lampiran : 1 (satu)

T e n t a n g

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN RENCANA KERJA

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan keharusan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Daerah;
b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Penetapan Rencana Kerja sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya;
d. bahwa untuk pelaksanaan penyusunan Penetapan Rencana Kerja Dinas Daerah dimaksud pada huruf a dan b perlu dibentuk tim;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan pembentukan Tim Penyusun Penetapan Rencana Kerja Dinas Daerah tahun 2025, dengan keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Mengingat :

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Penetapan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tim dimaksud pada diktum KESATU adalah :

1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Pelatihan, dan Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Perdagangan tahun sebelumnya.
2. Menyusun program dan kegiatan prioritas untuk menunjang peningkatan kemudahan Pelaku IKM, dan Pengembangan Produk.
3. Menyusun jadwal pelaksanaan dan melaksanakan Forum PD untuk menyinkronkan program dan kegiatan prioritas Dinas PD terkait dengan usulan masyarakat.
4. Menyusun kriteria teknis Pelatihan, dan Pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM).
5. Menyusun kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas.
6. Menyusun Penetapan Rencana Kerja tahunan berdasarkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Bandung serta Rensta Dinas.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

   Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4).

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 Tahun 2009 Tentang

    Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

38. Peraturan Gubernur Jawa Barat No 72 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 No 4 Seri D);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005- 2025;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036;

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

46. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung;

47. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

48. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

49. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

50. Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 008.1.1/KEP.131-BAPPERIDA/2024 Tanggal 07 Maret 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang, 15 Juli 2024

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si

NIP: 19740717 199803 1 003

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Bandung (sebagai laporan)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 800/ Kep. 387 -Sekr / 2024

TANGGAL : 15 Juli 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS DAERAH TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENETAPAN RENJA TAHUN 2025

Pengarah	:	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Ketua	:	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
Sekretaris	:	Kepala Sub Bagian Penyusun Program	
Kelompok 1	:	Perencanaan Sarana Distribusi Perdagangan	
Ketua	:	Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi	
Anggota	:	1. Analis Perdagangan Ahli Muda	
Kelompok 2	:	Perencanaan Pengembangan Perdagangan Dan Pengendalian Barang Pokok Dan Penting	
Ketua	:	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dan Pengendalian Barang Pokok Dan Penting	
Anggota	:	1. Analis Perdagangan Ahli Muda	
Kelompok 3	:	Perencanaan Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral	
Ketua	:	Kepala Bidang Kemetrologian, Energi dan Sumber Daya Mineral	
Anggota	:	1. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	
		2. Analis Kebijakan Ahli Muda	
Kelompok 4	:	Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Industri	
Ketua	:	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri	

	Anggota	:	1. Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda
Kelompok 5		:	Perencanaan Pengawasan Dan Kerja sama Industri
	Ketua	:	Kepala Bidang Pengawasan Dan Kerja sama Industri
	Anggota	:	1. Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda
Kelompok 6		:	Perumusan dan Penyusunan Dokumen Renja
	Ketua	:	Perencana Ahli Muda
	Anggota	:	1. JFU Analis Perencanaan Anggaran
			2. JFU Pengelola Bahan Perencanaan

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si

NIP: 19740717 199803 1 003

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENJA DISPERDAGIN

KABUPATEN BANDUNG

NO	JENIS KEGIATAN	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan data dan informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
6	Penelaahan Rancangan RKPD Kabupaten Bandung	√			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√			

NO	JENIS KEGIATAN	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
10.b	**Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung**	√			
10.c	**Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan**	√			
10.d	**Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah sesuai surat edaran Bupati Bandung**	√			
11	**Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.**	√			
12	**Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten Bandung**	√			
13	**Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju**	√			

NO	JENIS KEGIATAN	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
14	**Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang telah disyahkan**	√			

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si

NIP: 19740717 199803 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, Nabiyullah Rasulullah Muhammad SAW, beserta kerabat, sahabat serta kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat menyelesaikan penyusunan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2024. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Bandung yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber-sumber lainnya.

Penyusunan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga mengacu kepada prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Strategis dan Program Pembangunan dalam daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, Peraturan Perundangan serta Kebijakan Nasional, Provinsi, yang berkaitan dengan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian.

Sangatlah disadari bahwa penyajian Penetapan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih belum sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada kami. Namun demikian, diharapkan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan.

Wassalamu'alaikum wr wb.

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si

NIP: 19740717 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I 1

P E N D A H U L U A N 1

I.1. LATAR BELAKANG 1
I.2. LANDASAN HUKUM 2
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5
I.4. SISTEMATIKA 6

BAB II 8

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 8

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD 8
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 40
II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 59
II.3.1. Identifikasi Permasalahan 61
II.3.2. Penentuan isu-isu Strategis 64
II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 73
II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT . 93

BAB III 161

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 161

III.1. TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 161
III.1.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga 161
III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 163
III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 179

BAB IV 202

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 202

BAB V 214

P E N U T U P 214

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Guna mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penetapan Rencana Kerja Tahun 2025 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Penetapan Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana dan program, Penetapan Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang disusun Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah rencana kerja tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan potret kebutuhan pembangunan perekonomian serta indikator sasaran program yang akan dilaksanakan secara terencana dan merupakan program kegiatan prioritas melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, dan sumber anggaran lain yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun anggaran 2025.

Penyusunan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2025 pada dasarnya sudah ditempuh tahapan penyusunan secara sistematis, yakni persiapan penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah melalui proses sebagai

berikut: (a) pengolahan data dan informasi; (b) analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; (c) mereview hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra 2021-2026; (d) penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; (e) penelaahan Penetapan RKPD kabupaten; (f) perumusan tujuan dan sasaran; (g) penelaahan usulan masyarakat; dan (h) perumusan kegiatan prioritas.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Penetapan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

d. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

l. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

n. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pengembangan Daerah;

o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

u. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

v. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung;

w. Peraturan Bupati Bandung 92 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025 dimaksudkan menetapkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selama Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Penetapan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung adalah :

1. Memberikan gambaran tentang evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025 dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2026;

2. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang Perdagangan dan Perindustrian selama lima tahun yakni tahun 2021-2026 dan merumuskan isu-isu strategis yang harus ditangani tahun 2025;

3. Mendeskripsikan tentang program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Pada Tahun 2025;

4. Memberikan arahan tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus dijadikan pedoman para pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada akhir tahun 2025;

5. Menjabarkan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dalam rencana program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2025. Sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program dan kegiatan prioritas;

6. Menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran 2025;

7. Memberikan gambaran tentang pagu indikatif pembiayaan program kegiatan yang menjadi dasar penyusunan Penetapan rencana kerja anggaran (RKA) Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

8. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (S*ustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan RKPD, atau

program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Lampirkan tabel berikut, yaitu dari hasil pengerjaan di bagian C.1.5 (telaahan terhadap Rancangan RKPD)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rancangan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Penetapan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

a. Penetapan Indikator Kinerja
   Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
b. Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2023
   Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung untuk belanja sebesar **Rp45.590.266.759,00** *(Empat Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).* Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel Realisasi Keuangan ini :

Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Rp 198.704.250,00**	**Rp 181.744.200,00**	**91%**
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 198.704.250,00**	**Rp 181.744.200,00**	**91%**
3.30.05.2.01 .01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Rp 165.706.250,00	Rp 156.546.200,00	94%
3.30.05.2.01 .05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Rp 32.998.000,00	Rp 25.198.000,00	76%
3.30.05.2.01 .04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Rp -	Rp -	-
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Rp 731.821.450,00**	**Rp 610.321.700,00**	**83%**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Rp 731.821.450,00**	**Rp 610.321.700,00**	**83%**
3.30.07.2.01 .05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 475.590.450,00	Rp 469.290.700,00	99%
3.30.07.2.01 .06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 256.231.000,00	Rp 141.031.000,00	55%
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Rp 1.904.277.351,00**	**Rp 1.892.842.800,00**	**99%**
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Rp 162.133.800,00**	**Rp 152.304.800,00**	**94%**
3.30.04.2.01 .03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp -	Rp -	-
3.30.04.2.01 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp 162.133.800,00	Rp 152.304.800,00	94%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Rp -	Rp -	-
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Rp 1.724.913.551,00**	**Rp 1.723.308.000,00**	**100%**
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 1.694.843.551,00	Rp 1.693.368.000,00	100%
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Rp 6.810.000,00	Rp 6.810.000,00	100%
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 23.260.000,00	Rp 23.130.000,00	99%
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 17.230.000,00**	**Rp 17.230.000,00**	**100%**
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Rp -	Rp -	-
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp 17.230.000,00	Rp 17.230.000,00	100%
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Rp -	Rp -	-
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Rp 2.031.300.857,00**	**Rp 1.908.723.124,00**	**94%**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Rp 1.905.145.357,00**	**Rp 1.785.767.624,00**	**94%**
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 324.178.750,00	Rp 320.853.050,00	99%
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 1.580.966.607,00	Rp 1.464.914.574,00	93%
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Rp 126.155.500,00**	**Rp 122.955.500,00**	**97%**

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 126.155.500,00	Rp 122.955.500,00	97%
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Rp 237.461.000,00**	**Rp 233.651.500,00**	**98%**
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Rp 211.331.000,00**	**Rp 209.161.500,00**	**99%**
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 211.331.000,00	Rp 209.161.500,00	99%
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Rp 12.850.000,00**	**Rp 11.380.000,00**	**89%**
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 12.850.000,00	Rp 11.380.000,00	89%
3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**Rp 13.280.000,00**	**Rp 13.110.000,00**	**99%**
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Rp 13.280.000,00	Rp 13.110.000,00	99%
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Rp 229.201.996,00**	**Rp 225.562.336,00**	**98%**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Rp 229.201.996,00**	**Rp 225.562.336,00**	**98%**
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp 59.500.626,00	Rp 58.823.400,00	99%
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 169.701.370,00	Rp 166.738.936,00	98%
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Rp -	Rp -	-
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp 36.792.465.843,00**	**Rp 35.419.307.588,00**	**96%** **-**
3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp -**	**Rp -**	
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp -	Rp -	'-

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp -	Rp -	-
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp 777.242.050,00**	**Rp 741.195.406,00**	**95%**
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.500.000,00	Rp 7.495.000,00	100%
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 430.991.050,00	Rp 429.656.825,00	100%
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 20.000.000,00	Rp 19.979.460,00	100%
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 20.000.000,00	Rp 13.592.000,00	68%
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 156.292.000,00	Rp 128.584.774,00	82%
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 142.459.000,00	Rp 141.887.347,00	100%
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp 55.000.000,00**	**Rp 54.540.000,00**	**99%**
3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 55.000.000,00	Rp 54.540.000,00	99%
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Rp -	Rp -	-
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 564.473.950,00**	**Rp 512.374.903,00**	**91%**
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 89.570.000,00	Rp 72.328.554,00	81%
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25.000.000,00	Rp 24.530.000,00	98%
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 215.012.000,00	Rp 194.588.105,00	91%
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 234.891.950,00	Rp 220.928.244,00	94%
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp 596.103.088,00**	**Rp 567.421.878,00**	**95%**
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	100%
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 10.000.000,00	Rp 9.130.000,00	91%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 152.834.088,00	Rp 151.070.492,00	99%
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	100%
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 398.269.000,00	Rp 372.221.386,00	93%
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	100%
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	100%
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp 32.402.321.875,00**	**Rp 31.267.900.389,00**	**96%**
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	100%
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 15.000.000,00	Rp 14.089.000,00	94%
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 32.363.321.875,00	Rp 31.229.811.689,00	96%
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 14.000.000,00	Rp 13.999.700,00	100%
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp 2.397.324.880,00**	**Rp 2.275.875.012,00**	**95%**
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 148.212.000,00	Rp 105.334.012,00	71%
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 2.249.112.880,00	Rp 2.170.541.000,00	97%
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Rp 5.104.205.476,00**	**Rp 4.641.868.793,00**	**91%**
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Rp 5.104.205.476,00**	**Rp 4.641.868.793,00**	**91%**
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Rp 187.670.000,00	Rp 186.332.400,00	99%
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 38.728.983,00	Rp 38.728.000,00	100%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp 871.294.800,00	Rp 851.840.863,00	98%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 4.006.511.693,00	Rp 3.564.967.530,00	89%
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp -	Rp -	-
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Rp 175.913.000,00**	**Rp 174.253.868,00**	**99%**
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Rp 175.913.000,00**	**Rp 174.253.868,00**	**99%**
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 98.217.600,00	Rp 97.749.600,00	100%
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp 77.695.400,00	Rp 76.504.268,00	98%
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Rp 208.326.000,00**	**Rp 208.326.000,00**	**100%**
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Rp 208.326.000,00**	**Rp 208.326.000,00**	**100%**
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Rp 78.156.000,00	Rp 78.156.000,00	100%
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Rp 30.115.000,00	Rp 30.115.000,00	100%

Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp 100.055.000,00	Rp 100.055.000,00	100%
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Rp 97.136.200,00**	**Rp 93.664.850,00**	**96%**
3.29.05.2.01	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 97.136.200,00**	**Rp 93.664.850,00**	**96%**
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 83.826.000,00	Rp 81.234.850,00	97%
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.830.200,00	Rp 8.760.000,00	99%
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.480.000,00	Rp 3.670.000,00	82%
Jumlah		**Rp 47.710.813.423,00**	**Rp 45.590.266.759,00**	**96%**

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran yang berbentuk *output* pada tahun 2023, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 berdasarkan pada *outcome* setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021. Adapun capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.2

T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023

Kabupaten Bandung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola**	**100%**	**80%**	**80%**	**80%**	100%	**80%**	**80%**	**80%**
3.29.05.2.01	**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan**	**100%**	**95%**	**80%**	**95%**	119%	**80%**	**90%**	**90%**
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.29.05.2.01.02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi perizinan dan jumlah dokumen informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi yang dikeluarkan	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	50%
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	85 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	51 Laporan	60%
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	**87,00**	**80.15 Poin**	**77 Poin**	**82 Poin**	106%	**83 Poin**	83 Poin	95%
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	150%	2 Dokumen	7 Dokumen	70%
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	9 Laporan	60%
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	60%
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100%**
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/Bulan	223 Orang/Bulan	214 Orang/Bulan	214 Orang/Bulan	100%	223 Orang/Bulan	223 Orang/Bulan	100%
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	60%
3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Peningkatan Disiplin pegawai**	**79%**	**85%**	**78%**	**80%**	103%	**100%**	**88%**	**113%**
3.30.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	21 Orang	7 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	7 Orang	14 Orang	67%
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	80%
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	112 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	72 Laporan	64%
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	125 Laporan	100%	125 Laporan	375 Laporan	70%
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
3.30.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	150%
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	0 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	4 Unit	57%
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelayanan Operasional Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100%**
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**100%**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit	18 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	18 Unit	43 Unit	58%
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	12 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	12 Unit	39 Unit	65%
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	24 Unit	60%
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
3.30.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu**	**100%**	**0%**	**0%**	**-**	#VALUE!	**100%**	**50%**	**50%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	0,00	0,00	0,00	0%	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	1200%
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin**	**80%**	**58%**	**65%**	**65%**	101%	**70%**	**64%**	**81%**
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang memiliki izin**	**80%**	**77%**	**65%**	**83%**	127%	**70%**	**77%**	**96%**
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase gudang yang memiliki tanda daftar**	**30%**	**0%**	**15%**	**28%**	185%	**20%**	**16%**	**53%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**	**Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW**	**50%**	**29%**	**20%**	**39%**	194%	**10%**	**39%**	**78%**
3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar**	**25%**	**13%**	**20%**	**20%**	100%	**21%**	**21%**	**84%**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	**75%**	**67%**	**60%**	**67%**	111%	**65%**	**66%**	**88%**
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	3 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	3 Unit	10 Unit	333%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	55 Unit	12 Unit	26 Unit	35 Unit	135%	11 Unit	58 Unit	105%
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar**	**13,0%**	**7,1%**	**5,0%**	**2,4%**	47%	**7,5%**	**8%**	**58%**
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting**	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**	97%	**3%**	**3%**	**99%**
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**54%**	**55%**	**80%**	**98%**	123%	**80%**	**78%**	**144%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Persentase harga dan stok BAPOKTING di tingkat pasar Kabupaten/Kota yang dikendalikan**	**89%**	**94%**	**89%**	**117%**	131%	**89%**	**100%**	**112%**
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	168 Laporan	192 Laporan	320%
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	80%
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer**	**90%**	**22%**	**50%**	**50%**	100%	**90%**	**54%**	**60%**
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	25 Laporan	42%
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Eksport Bersih Perdagangan Non Migas	**$ 727.432.463**	**1.048.724.223,27**	**$ 726996440**	**$ 1108872543,35**	153%	**727.141.781,00**	$ 1108872543,35	152%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan**	**15%**	**0%**	**4%**	**0%**	0%	**4%**	**4%**	**27%**
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang	12 Pelaku Usaha	0,00	0,00	-	0%	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	33%
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0%	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	33%
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	15 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0%	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	20%
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	75 Produk	15 Produk	15 produk	15 produk	100%	15 Produk	45 Produk	60%
3.30.06	**PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP sesuai standar**	**100%**	**89%**	**85%**	**85%**	101%	**90%**	**88%**	**88%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera sah**	**100%**	**32%**	**85%**	**29%**	34%	**90%**	**50%**	**50%**
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	20000 Unit	3627 Unit	2000 Unit	3112 Unit	156%	5000 Unit	11739 Unit	59%
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 Orang	200 Orang	40 Orang	40 Orang	100%	350 Orang	590 Orang	59%
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran**	**42%**	**13%**	**21%**	**21%**	101%	**28%**	**28%**	**67%**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung**	**100%**	**20%**	**40%**	**45%**	113%	**60%**	**60%**	**60%**
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	120 UMKM	0,00	40 UMKM	40 UMKM	100%	50 UMKM	90 UMKM	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	120 UMKM	0,00	40 UMKM	40 UMKM	100%	40 UMKM	80 UMKM	67%
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pembangunan sumber daya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten**	**100%**	**32%**	**40%**	**56%**	140%	**60%**	**60%**	**60%**
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	**25 Dokumen**	**1 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	100%	**5 Dokumen**	11 Dokumen	44%
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	120%
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin**	**15%**	**10%**	**8%**	**9%**	124%	**10%**	**10%**	**67%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah	**100 Perusahaan**	**17 Perusahaan**	**20 Perusahaan**	**20 Perusahaan**	100%	**95 Rekomendasi**	132 Rekomendasi	132%
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang Berlokasi di Satu Kabupaten/Kota Sepanjang Merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain Bidang usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/ Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Bidang Usaha Sektor Perindustrian Dengan Tingkat Risiko Usaha Menengah -Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan OSS RBA, Bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, Selain Bidang Usaha Tertentu yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	33%
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM**	**Persentase pelaporan SIINAS**	**100%**	**30%**	**40%**	**52%**	130%	**60%**	**60%**	**60%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri**	**100%**	**33%**	**40%**	**42%**	104%	**60%**	**60%**	**60%**
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Mei 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%

KEPALA DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BANDUNG

DICKY ANUGRAH. SH., M.Si
NIP: 19740717 199803 1 003

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tidak bisa melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Sehingga banyak program kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung tidak dapat direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah tidak maksimal.

Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung yang mengacu pada misi Kepala Daerah, misi ke 1 (satu) yaitu: ***"Membangkitkan Daya Saing Daerah"*** merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan "Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera". Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Tahun 2021-2026

Visi	**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera**		
Misi	**Membangkitkan Daya Saing Daerah**		
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya produktivitas perindustrian yang berdaya saing	Tertatanya sentra industri	Merencanakan dan membangun sentra industri	Penetapan sentra industri
			Optimalisasi standardisasi produk IKM
			Optimalisasi pendampingan IKM dalam pemasaran produk
			Optimalisasi sarana dan prasarana IKM

Visi	**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera**		
Misi	**Membangkitkan Daya Saing Daerah**		
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	Meningkatnya kepatuhan industri	Meningkatkan pengendalian izin dan pengawasan industri	Optimalisasi perizinan perusahaan industri
	Tersedianya sistem informasi industri yang valid dan terkini	Meningkatkan Pengelolaan Pelaporan Produksi pada SIINAS	Peningkatan Monitoring dan Pendampingan dalam pelaporan Produksi melalui SIINAS
Meningkatnya pelayanan distribusi barang di dalam wilayah	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan di wilayah	Meningkatkan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada pasar rakyat dan pedagang kaki lima	Pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana pasar rakyat
			Pembinaan dan penataan PKL di lingkungan pasar rakyat
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan izin usaha dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan	Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan
			Fasilitasi penerbitan rekomendasi tanda daftar Gudang
			Fasilitasi penerbitan rekomendasi surat tanda pendaftaran waralaba
	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	Meningkatkan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang bagi Wajib Tera Ulang
			Monitoring dan Evaluasi terhadap alat UTTP pasca Tera/Tera ulang & Pembinaan/penyuluhan Metrologi Legal

Visi	**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera**		
Misi	**Membangkitkan Daya Saing Daerah**		
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya produk IKM yang terfasilitasi ekspor	Meningkatkan Nilai Ekspor	Peningkatan promosi luar negeri
			Pembinaan dan Pengembangan produk ekspor
			Peningkatan produk ekspor
		Meningkatkan Promosi dan Pemasaran Produk Kabupaten Bandung	Pelaksanaan Promosi Produk melalui *event* pameran
			Pelaksanaan kerja sama dengan media *online* sebagai upaya pemasaran produk
		Mendorong stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi
			Monitoring dan Evaluasi bahan pokok dan barang penting
Meningkatnya pengelolaan langsung panas bumi	Meningkatnya kualitas layanan perijinan serta pengendalian dan pengawasan industri panas bumi	Mewujudkan penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi sebagai sumber energi baru terbarukan yang ramah lingkungan
Meningkatnya kualitas pengelolaan kinerja organisasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan instansi organisasi	Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan instansi organisasi	Peningkatan kinerja dan kualitas pengelolaan instansi organisasi

Upaya-upaya diatas merupakan program kegiatan prioritas yang terdapat pada Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Sehingga diharapkan pada tahun yang akan datang dapat meningkatkan anggaran program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung sesuai dengan perencanaan kebutuhan, untuk meningkatkan pencapaian kinerja terhadap Renstra Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan peningkatan Perekonomian Kabupaten Bandung sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PERANGKAT DAERAH berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Di bawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.4 T-C. 30

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PERDAGANGAN										
1	**Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas**	$726.851.099	$726.996.440	$727.141.781	$727.287.122	$727.432.463	$ 1.048.724.223	$ 1.108.872.543	$727.287.122	$727.432.463	
2	**Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran**	14%	21%	28%	35%	42%	13%	21,4%	35%	42%	
3	**Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting**	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2,91%	3%	3%	
4	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar**	20%	20%	22%	23%	25%	13%	20%	23%	25%	
5	**Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin**	60%	65%	70%	75%	80%	58%	65%	75%	80%	
6	**Persentase Alat UTTP sesuai standar**	80%	85%	90%	95%	100%	89%	85%	95%	100%	
	URUSAN PERINDUSTRIAN										
7	**Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten**	20%	40%	60%	80%	100%	32%	56%	80%	100%	
8	**Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin**	5%	8%	10%	13%	15%	10%	9%	13%	15%	

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	**Persentase pelaporan SIINAS**	20%	40%	60%	80%	100%	30%	52%	80%	100%	
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ALAM										
10	**Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola**	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	100%	

Tabel 2.5

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya produktivitas perindustrian yang berdaya saing	Tertatanya sentra industri	Persentase sentra industri yang sudah ada	(Jumlah Sentra Industri yang tertata / Jumlah Sentra Industri di Kabupaten Bandung) x 100%	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri
		Meningkatnya kepatuhan industri	Persentase kepatuhan industri	(Jumlah Perusahaan yang mengajukan permohonan Verifikasi Teknis / Jumlah Perusahaan pada Akun SIINAS) x 100%	Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri
		Tersedianya sistem informasi industri yang valid dan terkini	Persentase industri yang terdata dalam SIINAS	(Jumlah Perusahaan yang menyampaikan laporan semester/ Jumlah Perusahaan pada akun SIINas) x 100%	Bidang Pengawasan dan Kerjasama Industri
2	Meningkatnya pelayanan distribusi barang di dalam wilayah	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan di wilayah	Persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas di wilayah	(Jumlah sarana distribusi perdagangan (STPW, TDG, Toko modern, dan pasar rakyat) yang berkualitas / Jumlah sarana perdagangan (STPW, TDG, Toko modern dan pasar rakyat) di Kabupaten Bandung) x 100%	Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	Persentase alat UTTP sesuai standar	(Jumlah UTTP yang di tera, Tera Ulang / Jumlah Potensi UTTP) x 100%	Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Bidang Kemetrologian dan Laporan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UPT Kemetrologian
3	Meningkatnya produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya produk IKM yang terfasilitasi ekspor	Nilai ekspor produk IKM	Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas	Penerbitan SKA melalui aplikasi e-SKA Kementerian Perdagangan RI
4	Meningkatnya pengelolaan langsung panas bumi	Meningkatnya kualitas layanan perijinan serta pengendalian dan pengawasan industri panas bumi	Persentase pengelolaan pemanfaatan langsung panas bumi yang menyampaikan laporan kinerja tahunan	(WKP yang menyampaikan laporan kinerja Tahunan / Jumlah seluruh WKP) x 100%	Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan bidang Kemetrologian dan ESDM

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-1

SASARAN 1	Meningkatnya Produk IKM yang terfasilitasi Ekspor

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Ekspor Produk IKM	$726,851,099.00	$1,048,724,223.27	144%	$726,996,440.00	$ 1108872543,35	153%

Pertumbuhan nilai ekspor itu sendiri pada tahun 2023 mencapai $ 1108872543,35 dengan persentase capaian sebesar 153%. Upaya pencapaian Sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung. Dalam rangka tersebut dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha di bidang ekspor di wilayah Kabupaten Bandung terhadap peraturan dan kebijakan pengurusan dokumen ekspor yang sering mengalami perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2023 kegiatan ini diikuti sebanyak 75 peserta bagi pelaku usaha ekspor.

2. Pengembangan *database* informasi potensi unggulan.

Pengembangan *database* informasi potensi unggulan ditujukan untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki produk potensi unggulan ekspor, sehingga tersedianya *database* informasi potensi produk unggulan produk ekspor dapat meningkatkan nilai pertumbuhan ekspor dan memudahkan informasi tentang pasar tujuan ekspor.

3. Peningkatan citra produk ekspor

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait / asosiasi / pengusaha bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kendala yang menjadi penghambat untuk melakukan ekspor produk dari Kabupaten Bandung ke luar negeri serta peluang pasar tujuan ekspor baru yang dapat di intervensi oleh para pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung. Sehingga produk ekspor Kabupaten Bandung tidak hanya didominasi oleh tekstil dan produk tekstil saja tetapi komoditas lainnya, saat ini mulai muncul komoditas baru di Kabupaten Bandung yang menjadi potensi ekspor diantaranya kopi. Pada tahun 2023, kegiatan Focus Group Discusion (FGD) Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah diikuti oleh 15 peserta.

4. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota serta Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

   Dalam rangka meningkatkan promosi penggunaan produk dalam negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan pameran bagi produk unggulan Kabupaten Bandung sejumlah 15 produk unggulan yang difasilitasi promosi dan pemasarannya. Jumlah kegiatan pelaksanaan promosi yang dimaksud dilakukan sebanyak 6 kali yaitu Dukungan Fornas, Fasilitasi Penguatan Pemasaran Produk IKM Kab. Bandung Melalui E-Commerce (Blibli), Food Ethnic, bazar ramadhan, pameran inacraft dan pameran APKASI dengan anggaran sebesar Rp731.821.450,00 dan terealisasi sebesar Rp610.321.700,00 atau sebesar 83%.

5. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

   Dalam meningkatkan pemasaran produk dalam negeri, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melaksanakan sosialisasi terhadap Mahasiswa Tel-U sebanyak 50 Mahasiswa dan pameran Kembang Nusa di Gedung Graha Siliwangi sebanyak 8 IKM dengan anggaran sebesar Rp731.821.450,00 dan terealisasi sebesar Rp610.321.700,00 atau sebesar 83%.

6. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Barang Kebutuhan Pokok adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional dan mengurangi angka inflasi daerah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sampai saat ini memiliki inovasi daerah yaitu aplikasi SIBAPOKTING yang menunjukkan harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan bahan pokok dan barang penting pada pasar rakyat dengan data paling *update* dan *real time*. Selain itu, dilakukan juga Operasi Pasar Murah (OPM) ketika terjadi kelangkaan bahan pokok dan barang penting di masyarakat. selain itu, dilakukan monitoring dan pengendalian harga kebutuhan barang pokok dan barang penting terhadap pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar Rp162.133.800,00 dan terealisasi Rp Rp152.304.800,00 atau sebesar 94%

Adapun perkembangan jumlah volume ekspor pada tahun 2023 dengan rincian perkembangan volume ekspor per bulan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.1 Perkembangan Volume Ekspor (KGM)

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.7 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-1

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Potensi produk ekspor Kabupaten Bandung masih didominasi oleh tekstil dan produk tekstil dan diperlukan pengembangan produk ekspor baru sehingga tidak hanya tergantung pada produk tekstil. Selain itu negara tujuan ekspor masih tergantung pada negara-negara diwilayah Eropa dan sebagian Asia diperlukan perluasan negara tujuan baru pemasaran produk ekspor	Melakukan pendataan dan pengembangan tentang potensi produk unggulan Kabupaten Bandung yang dapat dijadikan produk ekspor. Yang saat ini sedang dilakukan adalah mendata peluang pasar. Negara tujuan ekspor baru melalui kegiatan pameran produk unggulan kopi di tingkat Internasional. Selanjutnya akan dibuat *database* ekspor
2.	Masih minimnya pengetahuan tentang prosedur ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga akses pemasaran produk	Melakukan pelatihan tentang ekspor bagi pelaku UKM dan IKM yang memiliki produk potensi ekspor sehingga kedepannya apabila ada UKM dan IKM yang memiliki potensi

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
	UKM selama ini masih terpaku pada pemasaran domestik. Adapun beberapa UKM yang sudah memiliki pasar di luar negeri tetapi mereka terbentur dengan pengetahuan bagaimana cara ekspor sehingga produk yang mereka jual tidak dapat dipasarkan	ekspor dapat melakukan pengiriman produknya secara langsung tanpa melalui perantara lagi, Mengirim sampel produk IKM ke *Buyer*, Melaksanakan temu bisnis antara IKM dan *Buyer* atau pembeli

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-2

SASARAN 2	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah					
Indikator Kinerja	**Tahun 2022**			**Tahun 2023**		
Sasaran	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Berkualitas di Wilayah	**20%**	**13%**	**65%**	**20%**	**20%**	**100%**

Realisasi kinerja Persentase sarana distribusi perdagangan yang berkualitas di wilayah kerjanya pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian sebesar 20%. Upaya untuk pencapaian sasaran ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja dan kontribusi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB dilakukan upaya-upaya sebagai berikut ini:

1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

   Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sektor perdagangan, dengan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha kecil yang ada di Kabupaten Bandung untuk menjalankan usahanya dalam hal pemasaran produk dengan membangun kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil terutama pelaku usaha toko modern agar dapat memberikan fasilitasi untuk dapat memasarkan produk pelaku usaha kecil di wilayah Kabupaten Bandung, dalam hal ini, Dinas Perdagangan dan Peindustrian memberikan hibah 6 Roda Kecil diberikan kepada 3 Bumdes yaitu Bumdes Ciwidey, Bumdes Margahayu, Bumdes Baleendah dengan anggaran sebesar Rp211.331.000,00 dan realisasi sebesar Rp209.161.500,00 atau sebesar 127%.

2. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

   Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dengan memperbaiki sarana dan prasarana distribusi barang/produk salah satunya ialah sarana dan prasarana pasar tradisional yang merupakan salah satu pusat perdagangan yang baik, bersih dan sehat. Pada Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp Rp1.905.145.357,00 dan realisasi sebesar Rp1.785.767.624,00 atau sebesar 94%. Perbaikan sarana dan prasarana pasar tradisional yang dilakukan pada tahun 2023 sebanyak 4 pasar, yaitu Renovasi untuk Pasar Baleendah, Ciwidey, Majalaya, dan Banjaran. Jumlah anggaran tersebut bersumber dari APBD dan dari Dana Insentif Daerah (DID) yaitu pembangunan bak sampah Pasar Margahayu, Majalaya, Ciwidey serta Pengadaan Countener sampah sebanyak 9 unit.

3. Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang

   Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi. TDG merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah tindak pidana ekonomi terhadap jenis-jenis barang tertentu yang diawasi peredarannya oleh Pemerintah. TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG. Jumlah gudang yang mendapatkan fasilitasi penerbitan TDG sebanyak 15 gudang. Pada tahun 2023, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp12.850.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.380.000,00 atau sebesar 89%.

4. Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik

   STPW merupakan bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi atau direkomendasi STPW dalam dan luar negeri sebanyak 57 pelaku usaha dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp13.280.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.110.000,00 atau sebesar 99%.

5. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

   Sarana Distribusi Perdagangan adalah sarana atau wadah untuk kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Kegiatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan pengelolaan distribusi perdagangan. Jumlah sarana distribusi perdagangan yang difasilitasi pengelolaannya pada Tahun

2023 sebanyak Unit sarana prasarana pasar tradisional dengan nilai anggaran sebesar Rp324.178.750,00 dan terealisasi sebesar Rp320.853.050,00 atau sebesar 99%.

6. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dilakukan dalam rangka peningkatan dan pemberian binaan kepada para pelaku sarana distribusi perdagangan. Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan pada tahun 2023 sebanyak 50 orang dengan anggaran sebesar Rp126.155.500,00 dan realisasi sebesar Rp122.955.500,00 atau sebesar 97%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.9 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-2

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Masih banyak toko modern yang enggan mengurus perijinan atau beroperasi sebelum permohonan ijinnya diterima sehingga terkesan banyak pelanggaran ijin pendirian toko modern tersebut	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional dan perijinan toko modern serta memberikan pemahaman tentang keberlangsungan hidup/usaha toko modern tidak ditujukan untuk mematikan usaha pasar tradisional serta menjalin kemitraan dengan para pelaku usaha mikro, kecil yang berada disekitar toko modern tersebut
2.	Perbaikan sarana dan prasarana perdagangan terutama bagi pasar tradisional memerlukan biaya yang cukup besar sedangkan kemampuan APBD Kabupaten Bandung tidak mencukup untuk melakukan perbaikan dan revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bandung	Untuk melakukan revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Bandung sehingga menjadi pasar yang nyaman, bersih dan sehat dengan tidak hanya bergantung pada APBD maka kami melakukan inovasi dengan menawarkan kerja sama pembangunan dan pengelolaan pasar kepada pihak ketiga (investor)

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3

SASARAN 3	Meningkatnya Perlindungan terhadap Konsumen					
Indikator Kinerja	**Tahun 2022**			**Tahun 2023**		
Sasaran	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase alat UTTP sesuai standar	**80%**	**89%**	**111%**	**85%**	**85%**	**100%**

Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak/kepentingan konsumen dalam hal ini ialah tentang kepatuhan pelaku usaha tertib ukur pada alat ukur takar timbang dan perlengkapan yang digunakan oleh pelaku usaha di Kabupaten Bandung. Upaya untuk mewujudkan saran ini terkait dengan tujuannya meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri dan peningkatan perlindungan terhadap konsumen, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan upaya untuk mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kepedulian dalam ketertiban serta kepatuhan untuk selalu menjaga kepercayaan konsumen terhadap kepastian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Upaya yang dilakukan antara lain:

1. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.

   Upaya untuk meningkatkan pelindungan konsumen dan tertib ukur dilakukan melalui peningkatan operasionalisasi pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) di wilayah Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh UPT Kemetrologian Kabupaten Bandung.

2. Dengan adanya UPT Kemetrologian diharapkan peran pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP yang selama ini dilakukan oleh Balai Kemetrologian Provinsi Jawa Barat bisa lebih optimal dapat memberikan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan kinerja perdagangan dalam negeri dan telah dilakukan pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP sebanyak 3.112 unit alat UTTP.

3. Sosialisasi tentang Kemetrologian

   Upaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang alat UTTP dan BDKT sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan kepada konsumen, dilakukan sosialisasi tentang peraturan, kebijakan dan peran kemetrologian dalam meningkatkan perdagangan dalam negeri. Pada tahun 2023 telah dilakukan sosialisasi dengan jumlah peserta 40 orang yang berasal dari pelaku usaha, instansi pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi tersebut masih banyak pelaku usaha, masyarakat dan instansi pemerintah sendiri yang belum mengerti serta paham tentang apa itu kemetrologian dan kenapa mesti melakukan tera dan tera ulang alat UTTP. Sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang diperlukan strategi lain yang lebih efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi tentang kemetrologian.

4. Pengawasan Kemetrologian

   Pengawasan kemetrologian merupakan salah satu upaya mewujudkan iklim usaha yang baik dan kondusif melalui terciptanya lingkungan usaha yang tertib ukur sehingga dapat memberikan kepercayaan dan perlindungan terhadap konsumen. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa alat UTTP yang digunakan pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki cap tanda tera sah yang berlaku. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tahun 2023

bekerja sama dengan Pengawas Direktorat Kemetrologian Kementerian Perdagangan RI terhadap 2.386 unit alat UTTP.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.11 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-3

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP yang dilakukan oleh UPT Kemetrologian belum maksimal karena keterbatasan petugas yang berhak melakukan tera dan tera ulang dalam hal ini ialah fungsional penera yang dimiliki oleh UPT Kemetrologian Kabupaten Bandung baru ada 4 orang yang merupakan pelimpahan dari Provinsi Jawa Barat, sedangkan area pelayanan begitu luas mencakup 31 kecamatan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian berusaha memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta bekerja sama dengan Direktorat Kemetrologian Kementerian Perdagangan RI untuk penambahan petugas penera, disamping itu pula mempersiapkan untuk penambahan jumlah penera baru pada tahun - tahun yang akan datang dengan memberikan biaya diklat kemetrologian bagi calon penera baru
2.	Pengawasan kemetrologian saat ini belum maksimal dikarenakan belum memiliki fungsional pengawas dan PPNS Kemetrologian yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, serta minimnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang aturan kemetrologian	Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta tentang kemetrologian serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi bergerak dibidang perlindungan konsumen untuk bersama-sama melakukan pengawasan kemetrologian untuk menciptakan suatu daerah yang tertib ukur

Tabel 2.12 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-4

SASARAN 4	Tertatanya Sentra Industri					
Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sentra Industri yang sudah tertata	7%	7%	100%	40%	56%	140%

*Realisasi tahun 2023 menggunakan proyeksi target tahun 2023

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada Tahun 2023 dalam meningkatkan daya saing produk industri kecil diantaranya dengan meningkatkan kemampuan teknologi industri dan standarisasi produk industri, untuk mewujudkan

hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

   Dalam upaya meningkatan kemampuan para pelaku industri kecil di wilayah Kabupaten Bandung dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilanya dalam menggunakan teknologi industri sehingga dapat meningkatkan produksi produk menjadi lebih efektif dan kualitas yang memiliki daya saing. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pagu anggaran Rp4.006.511.693,00 dan realisasi sebesar Rp3.564.967.530,00 atau sebesar 89% bersumber dari anggaran APBD, DBHCHT,DAK FISIK,DAK NON FISIK. Pada tahun 2022 telah dilakukan fasilitasi standardisasi produk bagi industri kecil yang bergerak di bidang makanan dan minuman,hasil hutan dan perkebunan sebanyak 100 IKM baik itu pelaku industri kecil dibidang olahan makanan maupun hasil hutan dan perkebunan, Dokumen Kajian Sentra Industri Tembakau (DBHCHT), IKM yang mendapatkan Bimtek Manajemen Mutu sebanyak 40 IKM, IKM yang mendapatkan Bimtek Penerapan Sertifikasi Produk dan Sistem Mutu sebanyak 50 IKM, IKM yang mendapatkan Bimtek Produksi/Standarisasi Produk sebanyak 45 IKM, IKM yang mendapatkan sosialisasi Temu Usaha IKM sebanyak 50 IKM, IKM yang mendapatkan Workshop/Sosialisasi Tembakau sebanyak 150 IKM, Pengadaan Mesin/Peralatan Pengolahan Aneka Kue, Revitalisasi Pusat Promosi/Ruang Pamer Sentra bertempat di Galeri Kriya Bedas Kabupaten Bandung.

2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

   Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk industri kecil di wilayah Kabupaten Bandung salah satunya industri kecil di bidang olahan makanan dan minuman yang merupakan salah satu industri kecil unggulan yang ada di Kabupaten Bandung. Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri kecil dilakukan upaya kegiatan pelatihan kemasan bagi industri olahan makanan dan minuman selain itu juga diberikan fasilitasi desain produk bagi industri kecil secara gratis, fasilitasi pembuatan desain produk dan kemasan yang diberikan oleh Tim Desain dan Kemasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pagu anggaran Rp871.294.800,00 dan realisasi sebesar Rp851.840.863,00 atau sebesar 98% bersumber dari anggaran APBD, DBHCHT,dan DID. Pada tahun 2022 IKM yang terpenuhi sarana prasarananya sebanyak 4 IKM, IKM yang mendapatkan Fasilitasi Peralatan Produksi Tembakau sebanyak 1 kelompok IKM, IKM yang mendapatkan Workshop/Bimtek Pengolahan Limbah Tembakau sebanyak 50 IKM, IKM yang tersertifikasi Profesi sebanyak 20 IKM.

3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri bersumber dari anggaran APBD dan Dana Insentif Daerah (DID) dengan jumlah sebesar Rp187.670.000,00 realisasi sebesar Rp186.332.400,00 atau sebesar 99% dengan rincian kegiatan sebagai beribut :

a. Dokumen Rencana Pembangunan Industri
b. Dokumen Web dan Skema Pendampingan
c. Sosialisasi terhadap 50 IKM
d. IKM yang mendapatkan Workshop perbaikan kemasan sebanyak 120 IKM
e. IKM yang tersertifikasi Profesi sebanyak 20 IKM

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.13 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-4

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Penerapan standarisasi produk, Pengetahuan dan pemahaman pelaku industri kecil terhadap pentingnya HKI merek dagang dan sistem mutu produk masih kurang.	pendampingan dan memfasilitasi dalam peningkatan dayasaing mutu produk IKM melalui fasilitasi desain produk dan desain kemasan, pengurusan standarisasi produk dan fasilitasi HKI merek dagang.

Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-5

SASARAN 5	Meningkatnya Kepatuhan Industri					
Indikator Kinerja Sasaran	**Tahun 2022**			**Tahun 2023**		
	Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase Kepatuhan Industri	**5%**	**9.5%**	**190.0%**	**7.5%**	**9.33%**	**124%**

Melihat pada ilustrasi data pada tabel di atas rata-rata capaian dari indikator sasaran mencapai 124% hal ini menunjukan bahwa tingkat pencapaian sasaran "*Meningkatnya kepatuhan Industri"* sangat baik dengan pencapain indikator kepatuhan industri. Meskipun pencapain kinerja pada tahun 2023 sudah mencapai target sasaran yang ditetapkan, pengembangan dan meningkatkan kepatuhan dalam perizinan industri kecil

dan menengah, untuk meningkatkan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah di sektor industri masih perlu ditingkatkan pada tahun yang akan datang sehingga produk industri kecil Kabupaten Bandung dapat bersaing dengan produk daerah lain bahkan produk dari luar negeri.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan industri terhadap perizinannya adalah sebagai berikut ini:

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

   Tujuan penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI adalah untuk pemberian izin kepada para pelaku usaha untuk melaksanakan, mengembangkan, dan menambah kegiatan usaha. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, dilakukan dua kegiatan yaitu fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam SIINas yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara eletronik. Kegiatan selanjutnya yaitu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki anggaran sebesar Rp175.913.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.253.868,00 atau sebesar 99%, dengan aktifitas kegiatan sebagai berikut :

   a. Fasilitasi perizinan IUI secara elektronik sebanyak 56 peserta yang terdiri dari IKM dan perusahaan industri
   b. Pelaksanaan pengawasan terhadap 75 Perusahaan industri.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.15 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke-5

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah disebabkan oleh fluktuatifnya harga	Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan kepada IKM, pengoptimalan potensi dan sumber daya lokal sebagai bahan baku industri sehingga tidak tergantung pada bahan baku impor

Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke -6

SASARAN 6	"Meningkatnya Produk IKM yang terfasilitasi Ekspor"

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Industri yang Terdata dalam SIINas	20%	28%	138%	40%	40%	100%

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Industri yang terdata dalam SIINAS adalah sebagai berikut ini:

1. Penyediaan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

   Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI direalisasikan kedalam tiga kegiatan yaitu yang pertama fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Selanjutnya yaitu Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINas. Sedangkan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu sebesar Rp208.326.000,00 dan realisasi sebesar Rp208.326.000,00 atau sebesar 100%.

Tabel 2.17 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke -6

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Kurangnya ketegasan dari pimpinan mengenai data yang harus dilaporkan ke SIINas. Proses verifikasi di kementerian memakan waktu cukup lama dan juga sering terdapat pengembalian data karena terdapat syarat yang kurang	Melakukan pendampingan ke lapangan atau ke perusahaan untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan pendaftaran SIINas

Tabel 2.18 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-7

SASARAN 7	Meningkatnya Kualitas Layanan Perijinan serta Pengendalian dan Pengawasan Industri Panas Bumi					
Indikator Kinerja Sasaran	**Tahun 2022**			**Tahun 2023**		
	Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase Pengelolaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi yang Menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan	**80%**	**80%**	**100.0 %**	**80%**	**80%**	**100%**

Capaian Kinerja pada indikator di atas target yang ditetapkan yaitu Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi sebagai sumber energi pada tahun 2023 terealisasi 80% dari target 80% dengan tingkat capaian sebesar 100%. Data yang kami sampaikan untuk urusan energi saat ini hanya meliputi pemanfaatan panas bumi secara langsung dikarenakan urusan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten/kota saat ini hanya pengawasan pemanfaatan panas bumi secara langsung sedangkan merupakan urusan energi dan sumber daya mineral lainya dilimpahkan kewenangannya menjadi kewenangan Provinsi.

Kabupaten Bandung merupakan Kabupaten yang memiliki potensi uap panas bumi yang cukup banyak. Sampai saat ini terdapat 3 wilayah Kawasan Pengambangan Panas Bumi yaitu Pangalengan, Kamojang-Darajat dan Cibuni dengan yang dikelola oleh 5 pengembang yaitu Pt Star Energy Geothermal Wayang Windu LTD dan PT Geo Dipa Energi (Pangalengan), PT.PGE (Pertamina Geoterhaml Energy Area Kamojang), PT. Star Energy Geothemal Darajat II Limited (Darajat) serta PT. Teknosatria

energi Geothermal (Cibuni). Namun, untuk wilayah cibuni sampai saat ini belum melakukan operasionalisasi ekplorasi pemanfaatan panas bumi. Upaya untuk mewujudkan tujuan meningkatnnya pemanfaatan volume uang panas bumi sebagai sumber energi dengan melakukan serbagai upaya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan panas bumi dengan instansi terkait baik itu pemrintah usat, provinsi maupun pihak pengembang PLTP terkait seberapa besar volume yang dihasilkan dan yang dapat dimanfaatkan sebagi sumber energi. Potensi volume panas bumi di wilayah Kabupaten Bandung tahun 2023 terdapat 4 potensi yang dapat dimanfaatkan dari total 5 potensi yang tersedia atau sebesar 80%.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah:

Tabel 2.19 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran ke -7

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Belum optimalnya pemanfaatan volume uap panas bumi yang dihasilkan sebagai sumber daya energi dikarenakan energi uap panas bumi yang dihasilkan hanya bergantung pada satu perusahaan yang bersedia membeli hasil sumber energi yang dihasilkan oleh panas bumi yaitu PT. PLN, serta masih terdapat 1 wilayah pengembangan panas bumi yang belum bisa dimanfaatkan	Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai bagaimana solusi dan kebijakan pemerintah pusat dalam pemanfaatan volume uap panas bumi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara efektif, serta mencari peluang lain investor atau perusahaan yang dapat membeli energi dari uap panas bumi yang dihasilkan sehingga potensi energi uap panas bumi bisa dimanfaatkan dengan optimal
2.	Keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang paham dan mengerti dibidang panas bumi saat ini hanya terdapat 1 orang yang paham tentang bidang panas bumi, serta kebijakan pemerintah daerah terhadap pemanfaatan panas bumi diwilayah Kabupaten Bandung sangat minim	Diperlukan regenerasi dan pengaderan untuk sumber daya manusia yang mengerti tentang panas bumi serta pengadaan sarana dan prasarana untuk melakukan monitoring pemanfaatan panas bumi secara bertahap agar proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan panas bumi di lapangan bisa berjalan dengan baik

Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-8

SASARAN 8	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Instansi Organisasi Perangkat Daerah					
Indikator Kinerja Sasaran	**Tahun 2022**			**Tahun 2023**		
	Target	**Realisasi**	**Capaian**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Nilai AKIP Disperin	**76**	**80.15**	**105.5%**	**77**	**82**	**106%**
Persentase aset dalam kondisi baik	**76,5%**	**80%**	**100%**	**78%**	**85%**	**110%**

Capaian indikator-indikator sasaran meningkatkan tatakelola pemerintahan instansi organisasi perangkat daerah pada tabel di atas. Pada tahun 2023 indikator untuk sasaran meningkatnya tatakelola pemerintahan instansi organisasi perangkat daerah terdapat 2 indikator yaitu indikator nilai AKIP Disperin dengan target 77 poin, terealisasi sebesar 82 poin dengan capaian realisasi target sebesar 106% dan persentase asset dalam kondisi baik dengan target 78%, capaian realisasi target sebesar 110% dengan realisasi persentase aset dalam kondisi baik sebesar 85%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target sasaran indikator meningkatkan tata kelola pemerintahan instansi Oraganisasi Perangkat Daerah adalah sebagia berikut:

a. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian

   Dalam mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas akuntabilitas kinerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diantaranya melalui pendampingan dan koordinasi dengan tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memberikan pendampingan pada unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT), RKA-PD, Perjanjian Kinerja (PK), dan pelaksanaan monitoring kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik dan terukur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah

   Untuk meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Daerah maka hal-hal yang disarankan perlu dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut:

   1. Kurangnya pengendalian dalam melaksanakan kebijakan/SOP terkait pengamanan aset kendaraan bermotor atas penguasaan oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak berhak, pencurian dan penggunaan aset kendaraan oleh pihak yang tidak berhak.

2. Belum dilaksanakan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas pelaksanaan kebijakan/ SOP Barang Milih Daerah.
3. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu mengenai penyusunan laporan keuangan keuangan, inventarisasi barang-barang milik daerah, proses pengumpulan data realisasi anggaran dan SOP penyusunan laporan keuangan Kementerian ·
4. Kurangnya monitoring kepada pegawai yang telah ditunjuk sebagai pengelola keuangan, pengelola kepegawaian, pengelola BMD, dan pengelola database secara rutin agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari sub sistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPKD Kabupaten Bandung Tahun 2019, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bandung tahun 2021-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang - Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM SDGs (*Sustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.3.1. Identifikasi Permasalahan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

Bidang Perdagangan

1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien.
   a. Belum Optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik, seperti sarana transportasi (jalan, akses dan alat angkut), sarana pergudangan dan keterampilan SDM. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok yang menjadi beragam.
   b. Belum optimalnya pengawasan distribusi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi akibat belum tersedianya data distributor dan pedagang eceran pupuk bersubsidi, lemahnya pengawasan penyaluran, lemahnya edukasi tentang regulasi pupuk bersubsidi, dan belum optimalnya penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi.
2. Belum efektif dan efisiennya pelaksanaan pengembangan distribusi dan pemasaran produk dalam negeri
   a. Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan distribusi dan promosi produk, kerja sama kemitraan dan pemasaran produk dalam negeri akibat kurangnya pelaksanaan pengembangan promosi.
   b. Kurangnya anggaran penunjang untuk promosi produk akibat rendahnya pengembangan kerja sama berbentuk kemitraan, kurangnya pemahaman akan pentingnya promosi, serta kurangnya pemasaran produk dalam negeri.
3. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional

   Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, agar konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Pembangunan pasar-pasar tradisional dilakukan sebagai upaya mengikis pasar-pasar modern yang mulai membanjiri masyarakat. Saat ini pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern karena selain lengkap, harga barang di pasar tradisional juga lebih terjangkau dibandingkan pasar modern. Untuk itu, demi menarik minat beli masyarakat, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dagang di pasar tradisional. Banyak pasar yang masih membutuhkan sarana prasarana yang memadai untuk kenyamanan konsumen dan pedagang agar masyarakat mau membeli di pasar tradisional.

4. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih terjangkau harganya.

   Ketergantungan konsumen Indonesia terhadap produk impor masih tinggi dibandingkan nilai ekspornya, padahal yang diharapkan adalah sebaliknya. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk dalam negeri yang terus melemah. Di dalam negeri menjadi kalah bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor ilegal. Di pasar internasional, produk tekstil dan produk tekstil (TPT) dan produk kayu kalah bersaing dengan produk dari China dan negara ASEAN lainnya. Tujuan dari peningkatan nilai ekspor adalah mengurangi ketergantungan konsumen dengan produk luar negeri sehingga produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri yang nantinya juga akan berdampak terhadap penerimaan devisa negara. Penggunaan barang impor dapat disiasati dengan memproduksi di dalam negeri barang-barang kebutuhan yang masih di impor. Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dijual dalam bentuk bahan mentah. Bahan mentah ini banyak di ekspor ke luar negeri dan di impor kembali dalam bentuk barang setengah jadi maupun bahan jadi. Untuk mengubah bahan mentah yang berpotensi menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi yang bernilai guna tentu bukan hal yang mudah. Diperlukan modal yang cukup untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan primer. Modal yang dimaksudkan berasal dari investasi. Investasi memiliki korelasi positif terhadap ekspor dan impor. Investasi akan mengakibatkan terjadinya impor barang modal dan bahan baku penolong, dimana produk-produk ini sebagian besar digunakan untuk memproduksi produk untuk keperluan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Selain itu, masih banyak kendala dalam memproduksi barang-barang tersebut.
5. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal

   Konsumen pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar, jasa dan kemetrologian. Selain itu, penyebab lainnya, masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap UU Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, membanjirnya produk impor yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bidang Industri

1. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar Jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar termasuk dalam Program Penataan Struktur Industri. Sektor IKM (Industri Kecil dan Menengah) diharapkan menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar. Namun kendala IKM untuk menjadi mitra bisnis bagi perusahaan besar adalah kurang optimalnya IKM dalam memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi dan pasokan barang yang kurang kontinu yang menyebabkan keterlambatan produksi.

2. Belum optimalnya pengembangan Industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri

   Peningkatan pembangunan industri hendaknya jangan sampai membawa akibat rusaknya lingkungan hidup. Hal ini diatur oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, akan mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan serta akan memberikan daya tarik investasi industri. Belum optimalnya pengembangan industri yang sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan disebabkan karena belum adanya program khusus yang fokus terhadap peningkatan kualitas dan populasi industri.

3. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana prasarana dan kondisi mesin yang sudah tua

   Pelaku IKM harus selalu melakukan inovasi dan kreatif supaya mampu bersaing kendati terkena dampak kebijakan dan permasalahan internal maupun eksternal. Peningkatan sarana dan dalam rangka optimalisasi pelayanan teknis dilakukan melalui upaya pengembangan dan penerapan hasil rekayasa teknologi industri bagi IKM. Terbatasnya dukungan infrastruktur sarana dan prasarana layanan teknis dapat menurunkan daya saing di sektor industri.

4. Lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah

   Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing juga dirasakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung pada industri kecil menengah. Akar masalah dari lemahnya daya saing industri kecil menengah disebabkan karena tingginya harga bahan baku, keterbatasannya peralatan yang di gunakan, terbatasnya kemampuan dan keterampilan industri, serta kurangnya promosi dan jejaring produk IKM.

5. Belum Optimalnya Pengembangan Industri Kecil Menengah.

   Industri Kecil Menengah memiliki peranan strategis dalam struktur industri dan ekonomi Indonesia. Namun pengembangan industri kecil menengah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan bahan baku untuk industri kecil menengah. Penyebab lainnya masih rendahnya kualitas produk industri agro dan hasil hutan. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang belum tertangani. Belum efisiensinya pemakaian energi di industri, dan pencemaran lingkungan hidup akibat emisi gas rumah kaca juga dapat menjadi akar masalah dari belum optimalnya pengembangan industri.

II.3.2. Penentuan isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalami Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.21 Isu Strategis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
Regulasi Kepanasbumian belum ada	Belum keluarnya peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan panas bumi	Potensi pemanfaatan langsung panas bumi belum optimal.	Belum optimalnya pemanfaatan langsung panas bumi.
		Tidak tersedianya dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi	Belum optimalnya pemanfaatan langsung panas bumi.
Belum efektif dan efisien jaringan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis	Belum optimalnya pengendalian stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Masih banyak pedagang ditingkat eceran yang menjual barang kebutuhan pokok dan barang strategis di atas harga eceran tertinggi (het)	Penetapan dan pengawasan harga yang kurang efektif menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok di tingkat eceran, yang berdampak pada daya beli masyarakat dan inflasi.
		Belum tersedianya data tentang produksi, kebutuhan dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Ketiadaan data yang terintegrasi menghambat perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan yang efektif dalam mengelola distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis.
		Mekanisme pemantauan dan pengawasan harga dan stok	Pemantauan dan pengawasan yang kurang optimal terhadap harga dan stok barang strategis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		barang kebutuhan pokok dan barang strategis belum optimal	dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, serta potensi spekulasi harga.
		Belum adanya data tentang perdagangan antar wilayah	Ketiadaan data perdagangan antar wilayah menghambat analisis dan optimalisasi distribusi barang antar wilayah, yang dapat menyebabkan ketimpangan distribusi dan disparitas harga.
	Belum optimalnya pengawasan distribusi dan pengendalian harga pupuk bersubsidi	Belum tersedianya data distributor, agen dan penjual eceran pupuk bersubsidi	Kurangnya data yang memadai tentang rantai distribusi pupuk bersubsidi menyebabkan ketidakjelasan dalam pemantauan distribusi dan potensi penyalahgunaan subsidi.
		Masih lemahnya pengawasan penyaluran pupuk distribusi ditingkat distributor ke pedagang pengecer pupuk.	Pengawasan yang kurang kuat pada penyaluran pupuk di tingkat distributor dan pengecer mengakibatkan penyaluran yang tidak merata dan potensi penyimpangan distribusi.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		Masih lemahnya edukasi tentang regulasi dan kebijakan pemerintah tentang pupuk bagi distributor, agen dan pengecer pupuk.	Harga serta Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tidak stabil
		Penyusunan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi (RDKK) masih belum optimal	Harga serta Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tidak stabil
Belum efektif dan efisien pelaksanaan pengembangan distribusi & pemasaran produk dalam negeri	Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan distribusi & promosi produk, kerja sama kemitraan dan pemasaran produk dalam negeri	Kurangnya pelaksanaan pengembangan promosi	Intensifikasi promosi yang belum optimal
	Kurangnya anggaran penunjang untuk promosi produk	Kurangnya pengembangan kerja sama kemitraan	Intensifikasi promosi yang belum optimal
		Kurangnya pemahaman akan pentingnya promosi &	Intensifikasi promosi yang belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		pengenalan produk ke masyarakat luas	
		Masih kurangnya pemasaran produk dalam negeri	Intensifikasi promosi yang belum optimal
Belum optimalnya pengawasan untuk pelaku usaha dan pergudangan	Masih adanya pelaku usaha toko modern dan pergudangan yang belum berizin	Kurang pengawasan terhadap gudang	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba
		Gudang tidak terdata dan belum memiliki izin	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba
		Kurang pengawasan terhadap toko modern	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, Gudang, dan perusahaan waralaba
	Penerima/ pemberi waralaba belum memiliki STPW	Kurang adanya sosialisasi STPW	Rendahnya kesadaran dalam hal perizinan toko modern, gudang, dan perusahaan waralaba
	Pelayanan kemetrologian legal masih belum optimal	Kurangnya SDM penera yang dimiliki	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan kemetrologian legal.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
		Belum optimalnya pelayanan metrologi legal atas permintaan wajib tera ulang (WTU)/OKO.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Belum terlaksananya pelayanan sidang tera/tera ulang di pasar pemda/pasar desa secara menyeluruh.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)/barang dalam keadaan terbungkus (BDK) pasca tera/tera ulang belum optimal	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
		Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kemetrologian kepada masyarakat.	Belum optimalnya standardisasi dan pelayanan konsumen
Daya Saing Pasar Rakyat Masih rendah	Sarana dan prasarana pasar rakyat belum memenuhi standar pasar sehat	Kurangnya pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat
	Pengelolaan pasar rakyat belum optimal	Masih rendahnya kompetensi pengelola pasar rakyat	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
	Masih rendahnya jiwa kewirausahaan pedagang pasar rakyat dan kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap para pedagang	Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap para pedagang	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat
	Sebagian harga komoditi di pasar rakyat kurang bersaing dan masih panjangnya mata rantai distribusi komoditi dari pemasok sampai ke pasar	Masih panjangnya mata rantai distribusi komoditi dari pemasok sampai ke pasar	Revitalisasi pasar rakyat menuju pasar sehat
	Kurang tertatanya PKL di sekitar pasar rakyat	PKL yang terorganisir	Belum tertatanya pedagang kaki lima di lingkungan sekitar pasar rakyat
Masih rendahnya tingkat daya saing industri besar dan industri kecil menengah (IKM)	Masih lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri menjadi rendah	Rendahnya tingkat Pendidikan dan keterampilan tenaga kerja industri/pelaku IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
	Bahan baku, barang modal dan bahan penolong masih tergantung pada produk impor	Masih terbatasnya bahan baku, barang modal dan bahan penolong lokal	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Masih rendahnya penerapan Standar Industri	Kurangnya pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha Industri dalam menerapkan standar industri	Belum terbentuknya sentra industri
	Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang rencana pembangunan industri daerah	Belum tersedianya data industri yang terintegrasi dalam sistem Informasi Perindustrian Daerah	Belum optimalnya pelaporan industri pada SIINAS
	Belum optimalnya pengelolaan manajemen usaha dan akses permodalan.	Kurangnya pengetahuan para pelaku IKM tentang pengelolaan manajemen keuangan.	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki para IKM	Kurangnya Modal Usaha yang dimiliki IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
	Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku IKM	Kurangnya tingkat pendidikan IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum optimal pengelolaan modal/pembiayaan/manajemen usaha	Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum optimalnya Legalitas Usaha/Legalitas Produk	Kurangnya informasi dan pemahaman terhadap legal formal	Rendahnya Kesadaran Perusahaan industri dalam perizinan
	Belum optimalnya penggunaan media Promosi/Media Sosial	Kurangnya penguasaan IT di kalangan IKM	Belum terbentuknya Sentra Industri
	Belum terbentuknya asosiasi Industri Per Komoditi IKM	Kurangnya motivasi membentuk asosiasi per komoditi	Belum terbentuknya Sentra Industri
Masih kurangnya IKM berpotensi Ekspor	Rendahnya peluang usaha bagi IKM	Belum tersedianya informasi peluang usaha bagi IKM	Intensifikasi Promosi IKM
	Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha terhadap bisnis ekspor	1. Kurangnya informasi pasar 2. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi perdagangan luar negeri 3. kurangnya modal	Intensifikasi Promosi IKM

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada bagian *review* terhadap Rancangan RKPD dilakukan proses membandingkan antara Rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Apakah sudah sesuai antara RKPD dengan kebutuhan yang ada. Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengusulkan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Peralatan kantor pendukung operasional Galeri Kriya Bedas
2. Pembelian mebel di Galeri Kriya Bedas dan UPTD
3. Belanja jasa keamanan dan *Cleaning Service* Galeri Kriya Bedas
4. Biaya pemeliharaan dan bayar pajak kendaraan pelayanan dan operasional Dinas
5. Fasilitasi rak gondola bagi IKM binaan
6. Pengadaan Mobile Laboratorium bahan Kepokmas
7. Pembelian alat MPOS (E-Retribusi) dan Lisensi
8. Pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
9. Penambahan anggaran kegiatan OPM
10. Pameran INACRAFT, APKASI, Food Ethnik, Fasilitasi Pameran di Mall
11. Belanja modal peralatan pengujian UTTP
12. Belanja modal peralatan pengawasan UTTP
13. Bazar Ramadhan
14. Kegiatan bisnis *matching* P3DN
15. Sosialisasi dan fasilitasi P3DN
16. Kajian RIPIK
17. Sertifikasi profesi pengolahan Kopi
18. DED rumah kemasan

Informasi hasil perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C. 31. *Review* terhadap Rancangan Tahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**	**Disperdagin**	**Nilai AKIP**	**86 Poin**	**37.438.124.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**	**Disperdagin**	**Nilai AKIP**	**86 Poin**	**39.603.346.960,00**
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD**	**100%**	**517.240.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD**	**100%**	**517.240.000,00**
3.30.01.2.01.01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	159.850.000,00	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	159.850.000,00
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKASKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKASKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	94.350.000,00	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	94.350.000,00
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.000.000,00	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.000.000,00
3.30.01.2.01.08	Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	75.540.000,00	Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	75.540.000,00
3.30.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statitstik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	60 Data	72.500.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statitstik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	60 Data	72.500.000,00
3.30.01.2.02	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan dokumen**	**100%**	**33.277.620.000,00**	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan dokumen**	**100%**	**33.277.620.000,00**

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu **Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**					**anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu** **Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**		
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/Bulan	33.238.620.000,00	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/Bulan	33.238.620.000,00
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00	Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	14.000.000,00	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/ SemesteranSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	14.000.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi**	**100%**	**5.000.000,00**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi**	**100%**	**5.000.000,00**
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**422.500.000,00**	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**472.500.000,00**
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor	Disperdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor	Disperdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000,00	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000,00
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Disperdagin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Disperdagin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	130.000.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20.000.000,00
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	150.000.000,00
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**47.500.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**47.500.000,00**
3.30.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	37.500.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	37.500.000,00
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase pelayanan operasional perkantoran**	**100%**	**2.723.164.000,00**	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase pelayanan operasional perkantoran**	**100%**	**4.605.045.000,00**

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	183.604.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	215.485.000,00
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.534.560.000,00	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.384.560.000,00
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**265.100.000,00**	**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**265.100.000,00**
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000,00
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	70.000.000,00
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	25.000.000,00
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.100.000,00	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.100.000,00
3.30.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Disperdagin**		**100%**	**180.000.000,00**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Disperdagin**		**100%**	**413.341.960,00**
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	180.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	413.341.960,00
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL**	**Disperdagin**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL**	**Disperdagin**			
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Disperdagin**	**Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola**	**80%**	**268.900.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Disperdagin**	**Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola**	**80%**	**268.900.000,00**
3.29.05.2.01	**Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan**	**80%**	268.900.000,00	**Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan**	**80%**	268.900.000,00
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	1 Dokumen	50.000.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			Kabupaten/Kota yang Ditetapkan					Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		
3.29.05.2.01.02	Penyusunan RekomendasiPerizinan dan Informasi IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	168.900.000,00	Penyusunan RekomendasiPerizinan dan Informasi IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	168.900.000,00
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan PengawasanPelaksanaan PerizinanPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Laporan	**50.000.000,00**	Pengendalian dan PengawasanPelaksanaan PerizinanPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Laporan	**50.000.000,00**
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN**	**Disperdagin**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN**	**Disperdagin**			
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Disperdagin**	**Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin**	**75%**	**233.500.000,00**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Disperdagin**	**Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin**	**75%**	**233.500.000,00**
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan**	**Disperdagin**	**Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin**	**75%**	203.500.000,00	**Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan**	**Disperdagin**	**Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin**	**75%**	203.500.000,00
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan melalui	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat	1 Dokumen	**203.500.000,00**	Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan melalui	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat	1 Dokumen	**203.500.000,00**

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik		Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik		Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda DaftarGudang**	**Disperdagin**	**Persentase gudang yang memiliki tanda daftar**	**25%**	15.000.000,00	**Penerbitan Tanda DaftarGudang**	**Disperdagin**	**Persentase gudang yang memiliki tanda daftar**	**25%**	15.000.000,00
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang	Disperdagin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	**15.000.000,00**	Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang	Disperdagin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	**15.000.000,00**
3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba (STPW)untuk Penerima Waralaba dariWaralaba Dalam Negeri**	**Disperdagin**	**Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW**	**10%**	15.000.000,00	**Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba (STPW)untuk Penerima Waralaba dariWaralaba Dalam Negeri**	**Disperdagin**	**Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW**	**10%**	15.000.000,00
3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Disperdagin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	**15.000.000,00**	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Disperdagin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	**15.000.000,00**
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Disperdagin**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar**	**23%**	**1.766.064.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Disperdagin**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar**	**23%**	**2.766.064.000,00**

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan**	**Disperdagin**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	**70%**	1.678.564.000,00	**Pembangunan dan PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan**	**Disperdagin**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	**70%**	2.678.564.000,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.569.114.000,00	Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	2.569.114.000,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	**109.450.000,00**	Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	**109.450.000,00**
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Disperdagin**	**Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar**	**10%**	87.500.000,00	**Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Disperdagin**	**Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar**	**10%**	87.500.000,00
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	**87.500.000,00**	Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	**87.500.000,00**
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Disperdagin**	**Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu**	**3%**	**876.960.000,00**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Disperdagin**	**Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu**	**3%**	**2.106.960.000,00**
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota**	**Disperdagin**	**Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**53%**	131.960.000,00	**Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota**	**Disperdagin**	**Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**53%**	131.960.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan SinkronisasiPeningkatan AksesibilitasBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	**131.960.000,00**	Koordinasi dan SinkronisasiPeningkatan AksesibilitasBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	**131.960.000,00**
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING**	**0,89**	720.000.000,00	**Pengendalian Harga, dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING**	**0,89**	1.950.000.000,00
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	25.000.000,00	Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	25.000.000,00
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalamSistem Informasi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	25.000.000,00	Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalamSistem Informasi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	25.000.000,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan	1 Laporan	**670.000.000,00**	Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan	1 Laporan	**1.900.000.000,00**

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota		Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota		Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer**	**90%**	25.000.000,00	**Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer**	**90%**	25.000.000,00
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	**25.000.000,00**	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	**25.000.000,00**
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Disperdagin**	**Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas**	**$ 727.287.122**	**436.378.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Disperdagin**	**Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas**	**$ 727.287.122**	**436.378.000,00**
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan**	**3%**	436.378.000,00	**Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan**	**3%**	436.378.000,00
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	150.000.000,00
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	75.000.000,00
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang	3 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang	3 Pelaku Usaha	150.000.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			Produk Ekspor Unggulan					Produk Ekspor Unggulan		
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra ProdukEkspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15 Produk	**61.378.000,00**	Peningkatan Citra ProdukEkspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15 Produk	**61.378.000,00**
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Disperdagin**	**Persentase Alat UTTP sesuai standar**	**95%**	**454.747.000,00**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Disperdagin**	**Persentase Alat UTTP sesuai standar**	**95%**	**454.747.000,00**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan**	**Disperdagin**	**Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah**	**95%**	454.747.000,00	**Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan**	**Disperdagin**	**Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah**	**95%**	454.747.000,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5000 Unit	206.960.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5000 Unit	206.960.000,00
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	**247.787.000,00**	Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	**247.787.000,00**
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Disperdagin**	**Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran**	**35%**	**150.000.000,00**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Disperdagin**	**Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran**	**35%**	**500.000.000,00**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri**	**Disperdagin**	**Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung**	**80%**	150.000.000,00	**Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri**	**Disperdagin**	**Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung**	**80%**	500.000.000,00
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi	40 UMKM	75.000.000,00	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi	40 UMKM	425.000.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40 UMKM	**75.000.000,00**	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40 UMKM	**75.000.000,00**
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN**	**Disperdagin**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN**	**Disperdagin**			
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Disperdagin**	**Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten**	**80%**	**3.956.960.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Disperdagin**	**Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten**	**80%**	**4.978.054.340,00**
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Jumlah dokumen rencana pembangunan industri**	**5 Dokumen**	3.956.960.000,00	**Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Jumlah dokumen rencana pembangunan industri**	**5 Dokumen**	4.978.054.340,00
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1.493.304.500,00	Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	2.459.621.800,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.675.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.675.000.000,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	468.655.500,00	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	468.655.500,00
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00	Evaluasi terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00
3.31.02.2.01.07	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00
3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Disperdagin	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang	1 Dokumen	5.000.000,00	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Disperdagin	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang	1 Dokumen	59.777.040,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan					dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan		
3.31.02.2.01.09	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00
3.31.02.2.01.10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	**5.000.000,00**	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	**5.000.000,00**
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Disperdagin**	**Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin**	**12,50%**	**281.960.000,00**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Disperdagin**	**Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin**	**12,50%**	**401.960.000,00**
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah**	**20 Perusahaan**	281.960.000,00	**Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah**	**20 Perusahaan**	401.960.000,00
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan	1 Dokumen	131.960.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan	1 Dokumen	131.960.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Disperdagin	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha	1 Dokumen	**150.000.000,00**	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Disperdagin	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha	1 Dokumen	**270.000.000,00**

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
			tertentu yang menjadi					tertentu yang menjadi		
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Disperdagin**	**Persentase pelaporan SIINAS**	**20%**	**850.000.000,00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Disperdagin**	**Persentase pelaporan SIINAS**	**20%**	**850.000.000,00**
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industriuntuk Informasi Industri untukIUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri**	**20%**	850.000.000,00	**Penyediaan Informasi Industriuntuk Informasi Industri untukIUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri**	**20%**	850.000.000,00
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis DataIndustri, Data Kawasan Industriserta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SistemInformasi Industri Nasional(SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	150.000.000,00	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis DataIndustri, Data Kawasan Industriserta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui SistemInformasi Industri Nasional(SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	150.000.000,00
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa IndustriKabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	650.000.000,00	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa IndustriKabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	650.000.000,00
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustri LingkupKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	1 Dokumen	50.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustri LingkupKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	1 Dokumen	50.000.000,00

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	dalamPenyampaian Data ke SIINas		dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			dalamPenyampaian Data ke SIINas		dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		
	JUMLAH TOTAL				46.713.593.000,00					52.599.910.300,00

Soreang, 15 Juli 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung	Verifikator JFT Perencana Muda	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Air
DICKY ANUGRAH. SH., M.Si	**PUNI SERUNI**	**DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT.**
NIP: 19740717 199803 1 003	NIP :19790912 200501 2 008	NIP: 19800327 200501 1 012

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk Rencana Kerja 2025, total kebutuhan awal yang semula sebesar Rp46.713.593.000,00 mengalami penyesuaian menjadi Rp52.599.910.300,00. Penyesuaian ini dilakukan setelah melalui proses analisis mendalam terhadap 11 Program, 23 Kegiatan, dan 70 Sub Kegiatan yang telah diidentifikasi.

Dengan penyesuaian ini, diharapkan Rencana Kerja 2025 dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

Musrembang diadakan untuk menyelaraskan program dan kegiatan Disperdagin dengan usulan dari kecamatan, serta menyelaraskan indikator, target, pendanaan, dan program antar dinas. Terdiri dari delegasi dari 62 kecamatan dan tamu undangan dari dinas terkait dan stakeholder.

Acara Forum Perangkat Daerah meliputi pembukaan, rapat pleno, pembahasan usulan program dan kegiatan, dan penandatanganan berita acara kesepakatan.

Tujuannya adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Kedua, Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Ketiga, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan.

TABEL T-C. 32.

DAFTAR SKALA PRIORITAS USULAN MUSRENBANG TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Ancolmekar	Arjasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
2	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarjaya	Arjasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mekarjaya	Arjasari	10	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 36.940.650,00
4	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Pinggirsari	Arjasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
5	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	10	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 36.940.650,00
6	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
7	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -
8	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -
9	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -
11	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunjaya	Arjasari	0	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp -
12	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Batukarut	Arjasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
13	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Rancamanyar	Baleendah	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
14	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Bojongmalaka	Baleendah	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
15	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Baleendah	Baleendah	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
16	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Jelekong	Baleendah	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margahurip	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
18	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Banjaran Wetan	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
19	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Banjaran Kulon	Banjaran	4	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 6.267.820,00
20	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Sindangpanon	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
21	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarjaya	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
22	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Mekarjaya	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
23	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Banjaran Wetan	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Kamasan	Banjaran	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00
25	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Kamasan	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
26	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Tarajusari	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
27	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Tarajusari	Banjaran	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
28	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Tarajusari	Banjaran	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
29	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Lengkong	Bojongsoang	6	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 9.401.730,00
30	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Lengkong	Bojongsoang	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Lengkong	Bojongsoang	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 6.816.375,00
32	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Lengkong	Bojongsoang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
33	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Lengkong	Bojongsoang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
34	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Bojongsari	Bojongsoang	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 6.816.375,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
35	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Tegalluar	Bojongsoang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
36	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Jatisari	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
37	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Jatisari	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
39	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
40	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
41	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
42	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
43	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cangkuang	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
44	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Bandasari	Cangkuang	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Nagrog	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
46	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Nagrog	Cicalengka	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00
47	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Margaasih	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
48	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Tanjungwangi	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
49	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Panenjoan	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
50	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cikuya	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
51	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cikuya	Cicalengka	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cicalengka Wetan	Cicalengka	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
53	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Tanjunglaya	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
54	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarlaksana	Cikancung	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 6.814.845,00
55	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Mekarlaksana	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
56	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Tanjunglaya	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
57	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cikasungka	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
58	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cikasungka	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mandalasari	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
60	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Hegarmanah	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
61	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Ciluluk	Cikancung	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 6.814.845,00
62	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Ciluluk	Cikancung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
63	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Girimekar	Cilengkrang	20	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 45.432.300,00
64	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Girimekar	Cilengkrang	0	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp -
65	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cibiru Wetan	Cileunyi	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cileunyi Wetan	Cileunyi	6	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 13.632.750,00
67	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cimekar	Cileunyi	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 10.917.540,00
68	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cinunuk	Cileunyi	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 9.086.460,00
69	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cileunyi Kulon	Cileunyi	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
70	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Mekarsari	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
71	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Warjabakti	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
72	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Warjabakti	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Pasirhuni	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
74	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Pasirhuni	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
75	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Campakamulya	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
76	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Campakamulya	Cimaung	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Industri Dan Peran Serta Masyarakat							
77	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Mandalamekar	Cimenyan	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
78	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cibeunying	Cimenyan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
79	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarmanik	Cimenyan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Mekarmanik	Cimenyan	6	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 13.632.750,00
81	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarmanik	Cimenyan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
82	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Cimenyan	Cimenyan	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
83	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Serangmekar	Ciparay	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
84	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Babakan	Ciparay	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
85	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Babakan	Ciparay	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
86	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Ciparay	Ciparay	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mangunharja	Ciparay	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
88	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Gunungleutik	Ciparay	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 7.834.775,00
89	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Panyocokan	Ciwidey	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
90	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan	#MS Bimtek Roasting Kopi	Rawabogo	Ciwidey	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 11.358.075,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumberdaya Industri							
91	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Nengkelan	Ciwidey	1	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 2.729.385,00
92	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Panundaan	Ciwidey	1	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 2.729.385,00
93	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Sukawening	Ciwidey	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Sukawening	Ciwidey	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 11.358.075,00
95	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Citeureup	Dayeuhkolot	5	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 7.834.775,00
96	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Citeureup	Dayeuhkolot	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00
97	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Citeureup	Dayeuhkolot	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
98	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Ibun	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
99	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Dukuh	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
100	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Dukuh	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Laksana	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
102	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Laksana	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
103	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Lampegan	Ibun	4	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 6.267.820,00
104	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Lampegan	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
105	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Lampegan	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
106	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Neglasari	Ibun	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
107	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Banyusari	Katapang	20	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 54.587.700,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Sukapura	Kertasari	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 6.814.845,00
109	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cihawuk	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
110	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cihawuk	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
111	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Neglawangi	Kertasari	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
112	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Neglawangi	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
113	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Cikembang	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
114	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cikembang	Kertasari	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 6.814.845,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cikembang	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
116	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Santosa	Kertasari	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00
117	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Santosa	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
118	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Tarumajaya	Kertasari	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peran Serta Masyarakat							
119	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Padasuka	Kutawaringin	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
120	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cilame	Kutawaringin	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
121	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cilame	Kutawaringin	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Jatisari	Kutawaringin	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
123	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Wangisagara	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
124	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Wangisagara	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
125	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Majalaya	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
126	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Padamulya	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
127	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Padaulun	Majalaya	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 8.188.155,00
128	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Padaulun	Majalaya	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Biru	Majalaya	3	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 8.188.155,00
130	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Padamulya	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
131	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Neglasari	Majalaya	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
132	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Nanjung	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
133	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Rahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
134	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Rahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
135	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Rahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Rahayu	Margaasih	4	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 14.776.260,00
137	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Lagadar	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
138	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cigondewah Hilir	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
139	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Lagadar	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peran Serta Masyarakat							
140	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Lagadar	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
141	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Lagadar	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
142	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Mekarrahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Mekarrahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
144	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mekarrahayu	Margaasih	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
145	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Magahayu Selatan	Margahayu	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
146	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Sulaiman	Margahayu	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
147	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margahayu Tengah	Margahayu	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
148	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Citaman	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
149	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Citaman	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Citaman	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
151	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Ganjar Sabar	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
152	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Ganjar Sabar	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
153	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Bojong	Nagreg	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Peran Serta Masyarakat							
154	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Mekarsari	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
155	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Mekarsari	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
156	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Girimulya	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Girimulya	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
158	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cikawao	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
159	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cikawao	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
160	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cikitu	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Sumberdaya Industri							
161	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Maruyung	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
162	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Maruyung	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
163	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Maruyung	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Cikitu	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
165	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Tanjungwangi	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
166	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cikawao	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
167	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Maruyung	Pacet	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Industri Dan Peran Serta Masyarakat							
168	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Rancatungku	Pameungpeuk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
169	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Bojongkunci	Pameungpeuk	1	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 3.694.065,00
170	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Bojongmanggu	Pameungpeuk	1	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 3.694.065,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Langonsari	Pameungpeuk	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
172	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Langonsari	Pameungpeuk	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
173	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Margamekar	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
174	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Margamekar	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Industri Dan Peran Serta Masyarakat							
175	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Lamajang	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
176	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Margaluyu	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
177	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margaluyu	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Sukamanah	Pangalengan	4	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 9.088.500,00
179	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Pulosari	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
180	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Margamukti	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
181	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margamukti	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
182	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Margamukti	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
183	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margamukti	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
184	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Pangalengan	Pangalengan	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Karangtunggal	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
186	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Karangtunggal	Paseh	1	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 1.566.955,00
187	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Cigentur	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
188	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Drawati	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumberdaya Industri							
189	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Drawati	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
190	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Sukamanah	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
191	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Sukamanah	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Sukamanah	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
193	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Loa	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
194	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Mekarpawitan	Paseh	1	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 1.566.955,00
195	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Mekarpawitan	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumberdaya Industri							
196	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Cigentur	Paseh	0	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp -
197	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Tangsimekar	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
198	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Tangsimekar	Paseh	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Sindangsari	Paseh	6	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 13.632.750,00
200	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Margamulya	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
201	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Mekarmaju	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
202	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Tenjolaya	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
203	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cisondari	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
204	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Mekarsari	Pasirjambu	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00
205	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Mekarsari	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Cibodas	Pasirjambu	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 11.360.625,00
207	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Cibodas	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00
208	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Margamulya	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
209	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Cikoneng	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
210	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Mekarsari	Pasirjambu	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00
211	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Patengan	Rancabali	10	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 22.721.250,00
212	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Cipelah	Rancabali	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 11.358.075,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Alamendah	Rancabali	5	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 11.358.075,00
214	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Alamendah	Rancabali	4	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 6.267.820,00
215	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Bojongloa	Rancaekek	20	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 45.442.500,00
216	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Padamukti	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Industri Kabupaten/Kota	Sumberdaya Industri							
217	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Padamukti	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
218	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Padamukti	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
219	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Bojongemas	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan Las	Bojongemas	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.272.125,0	Rp 4.544.250,00
221	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Kerajinan Rumah Tangga	Solokanjeruk	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 3.694.065,0	Rp 7.388.130,00
222	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Solokanjeruk	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 3.133.910,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Perbengkelan /Service motor	Rancakasumba	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.729.385,0	Rp 5.458.770,00
224	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	#MS Bimtek Roasting Kopi	Solokanjeruk	Solokanjeruk	2	Orang/Kegiatan	Rp 2.271.615,0	Rp 4.543.230,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN DARI DESA	DESA / KELUARAHAN	KECAMATAN	VOLUME		HARGA SATUAN	APBD KAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	#MS Bimtek Kemasan Bagi IKM	Soreang	Soreang	10	Orang/Kegiatan	Rp 1.566.955,0	Rp 15.669.550,00
TOTAL										**Rp 1.518.200.800**

Soreang, 15 Juli 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung	Verifikator JFT Perencana Muda	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Air
DICKY ANUGRAH. SH., M.Si	**PUNI SERUNI**	**DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT.**
NIP: 19740717 199803 1 003	NIP :19790912 200501 2 008	NIP: 19800327 200501 1 012

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa dan kecamatan, terdapat 225 usulan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang menjadi bahan diskusi dan diseleksi berdasarkan 4 kriteria teknis dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung menyetujui usulan musrembang melalui Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 sebanyak 217 usulan dengan nilai Rp1.518.200.800 untuk 600 peserta dengan 5 jenis pelatihan, yaitu Bimtek Perbengkelan/Service Motor, Bimtek Kemasan Bagi IKM, Bimtek Kerajinan Rumah Tangga, Bimtek Roasting Kopi, dan Bimtek Perbengkelan Las.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penetapan Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi, serta bagian dari sistem perencanaan Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Penetapan Rencana Kerja Satuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung seharusnya bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat Pusat, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional, maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat, RPJM Provinsi Jawa Barat, RKPD Provinsi Jawa Barat 2015; dan RPJMD Kabupaten Bandung 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bandung 2025.

III.1.1. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

1. Telaahan Kementerian Perdagangan

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Untuk itu, Kementerian Perdagangan RI dituntut memiliki kemampuan menjembatani kesenjangan yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang - Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Pembangunan Perdagangan dalam lima tahun ke depan akan sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang tercantum dalam Undang- Undang 17 tahun 2007 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. RPJPN 2005-2015 dilaksanakan dalam 4 tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), yang pada tahap 4 atau dalam periode 2020-2024 memiliki arah kebijakan untuk Pengembangan diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta mempertahankan peran lumbung pangan nasional. Berdasarkan arahan tersebut pembangunan Indonesia dalam periode ini diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Perdagangan memiliki 12 (dua belas) arah kebijakan. Masing-masing arah kebijakan memiliki strategi-strategi yang dilakukan sebagaimana dijelaskan seperti berikut:

1. Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, strategi ini dilakukan melalui pengamanan pangsa ekspor; meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif.
2. Peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerja sama perdagangan internasional; strategi ini dilakukan dengan meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).*
3. Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok, strategi ini dilakukan dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan; dan peningkatan koordinasi dan peran Pemerintah Daerah dalam kelancaran distribusi.
4. Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok, strategi ini dilakukan melalui peningkatan akurasi data harga barang kebutuhan pokok; peningkatan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok; dan optimalisasi pengelolaan impor barang kebutuhan pokok.

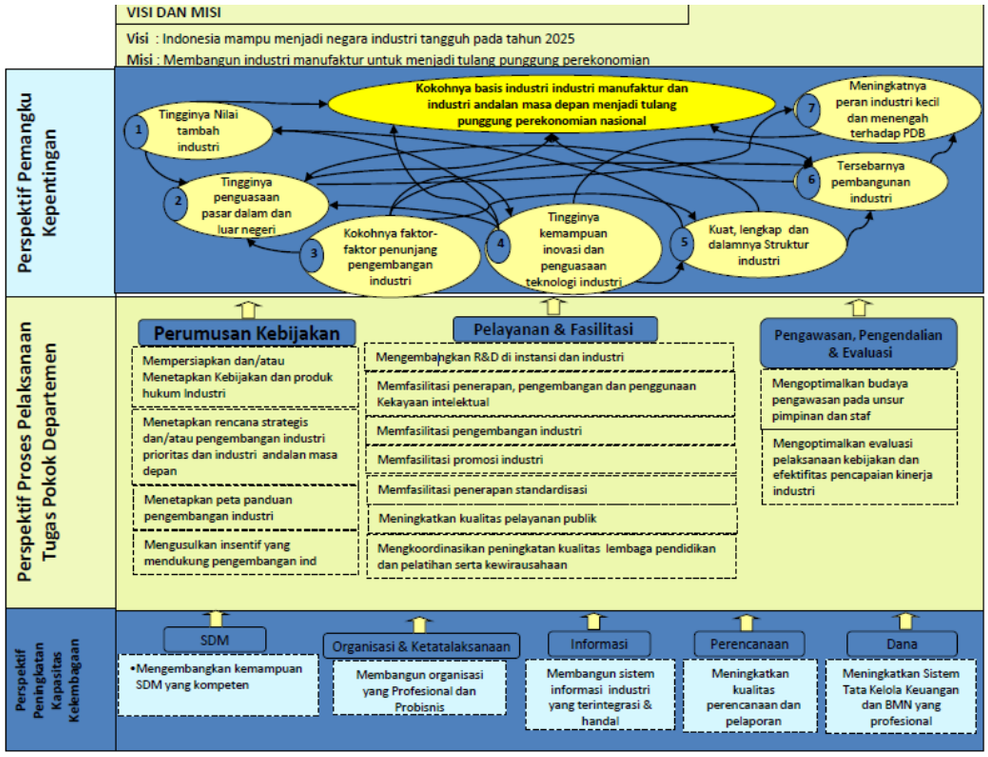
2. Telaahan Kementerian Perindustrian

Visi Kementerian Perindustrian Tahun 2019-2025 Sebagai amanat Undang - Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035.

RIPIN 2015 -2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, memuat antara lain tentang visi, misi, dan strategi pembangunan industri.

Visi pembangunan industri nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh. Industri tangguh bercirikan :

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan.
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.



Gambar. 3.1. Peta Strategis Kementerian Perindustrian

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu tren yang berkembang kearah perubahan. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkret dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

1) Meningkatnya produktivitas perindustrian yang berdaya saing
2) Meningkatnya pelayanan distribusi barang di wilayah
3) Meningkatnya produktivitas perdagangan yang berdaya saing
4) Meningkatnya pengelolaan langsung panas bumi

2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai antara lain ialah :

1) Tertatanya sentra industri

2) Meningkatnya IKM dan UKM yang terfasilitasi

3) Meningkatnya kepatuhan industri

4) Tersedianya sistem informasi yang valid dan terkini

5) Meningkatnya sarana distribusi perdagangan

6) Tersedianya jaminan kepada konsumen

7) Meningkatnya kualitas layanan (perizinan, pengendalian, dan pengawasan) industri panas bumi

Tabel T-C. 33

Tabel Tujuan dan Sasaran PD

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	Meningkatnya produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya produk IKM yang terfasilitasi ekspor	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas**			
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan**		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	
	Terlaksananya Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Tersedianya Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	
	Terlaksananya Peningkatan Citra Produk Ekspor	Tersedianya Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Peningkatan Citra Produk Ekspor			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Meningkatnya produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya produk IKM yang terfasilitasi ekspor	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran**			
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		**Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung**		
	Terlaksananya Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
	Terlaksananya Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	
	Meningkatnya produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya produk IKM yang terfasilitasi ekspor	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting**			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		**Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**		
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
	Terlaksananya Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Meningkatnya produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Meningkatnya produk IKM yang terfasilitasi ekspor	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**		**Persentase updating data harga dan stok SIBAPOKTING di tingkat pasar**		
	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
	Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
	Terlaksananya Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat distributor ke pengecer**		
	Terlaksananya Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Tersedianya Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
	Terlaksananya Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
	Terlaksananya Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	
2	Meningkatnya pelayanan distribusi barang di wilayah	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar**			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		**Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Terlaksananya Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	
	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Meningkatnya pelayanan distribusi barang di wilayah	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**		**Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar**		
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
	Meningkatnya pelayanan distribusi barang di wilayah	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin**			
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		**Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin**		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
	Meningkatnya pelayanan distribusi barang di wilayah	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**		**Persentase gudang yang memiliki tanda daftar**		
	Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	
	Meningkatnya pelayanan distribusi barang di wilayah	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri**		**Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW**		
	Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Meningkatnya pelayanan distribusi barang di wilayah	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP sesuai standar**			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		**Persentase Alat UTTP yang bertanda Tera yang sah**		
	Terlaksananya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Tersedianya Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	
	Terlaksananya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Tersedianya Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	
	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Tersedianya Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Penyidikan Metrologi Legal			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	
3	Meningkatnya produktivitas perindustrian yang berdaya saing	Tertatanya sentra industri	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten**			

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		**Jumlah dokumen rencana pembangunan industri**		
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
		dan Peran Serta Masyarakat				dan Peran Serta Masyarakat	
	Terlaksananya Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
	Meningkatnya produktivitas perindustrian yang berdaya saing	Meningkatnya kepatuhan industri	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin**			
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		**Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah**		

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Meningkatnya produktivitas perindustrian yang berdaya saing	Tersedianya sistem informasi industri yang valid dan terkini	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase pelaporan SIINAS**			
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		**Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri**		
	Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
	Terlaksananya Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
4	Meningkatnya pengelolaan langsung panas bumi	Meningkatnya kualitas layanan perijinan serta pengendalian dan pengawasan industri panas bumi	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola**			
			Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan**		
	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk Tahun 2025, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung mempunyai Prioritas Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan wewenang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

1) Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2) Administrasi keuangan perangkat daerah
3) Administrasi kepegawaian perangkat daerah
4) Administrasi umum perangkat daerah
5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
6) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
8) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

1) Penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota

3) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

1) Penertiban izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan
2) Penerbitan tanda daftar gudang
3) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri

4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

1) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
2) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya

5) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

1) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota
2) Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota
3) Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota

6) Program Pengembangan Ekspor

1) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

7) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

1) Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan

8) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

1) Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri

9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1) Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota

10) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota

11) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1) Penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN BANDUNG

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**	**Disperdagin**	**Nilai AKIP**	**86 Poin**	**37.438.124.000,00**	**39.603.346.960,00**	**APBD Kab. Bandung**	**87 Poin**	**35.851.922.000,00**	**Disperdagin**
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD**	**100%**	**517.240.000,00**	**517.240.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**100%**	**444.200.000,00**	**Disperdagin**
3.30.01.2.01.01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	159.850.000,00	159.850.000,00	APBD Kab. Bandung	2 Dokumen	234.850.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	10.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKASKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	10.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	10.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	5.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	94.350.000,00	94.350.000,00	APBD Kab. Bandung	3 Dokumen	94.350.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	APBD Kab. Bandung	4 Laporan	80.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.01.08	Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	75.540.000,00	75.540.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	75.540.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statitstik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	60 Data	72.500.000,00	72.500.000,00	APBD Kab. Bandung	60 Data	72.500.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.02	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu** **Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan**	**100%**	**33.277.620.000,00**	**33.277.620.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**100%**	**32.031.191.665,00**	**Disperdagin**
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/Bulan	33.238.620.000,00	33.238.620.000,00	APBD Kab. Bandung	223 Orang/Bulan	31.992.191.665,00	Disperdagin
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	15.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	10.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	APBD Kab. Bandung	2 Laporan	14.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi**	**100%**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**100%**	**5.000.000,00**	**Disperdagin**
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	5.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**422.500.000,00**	**472.500.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**100%**	**422.500.000,00**	**Disperdagin**
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor	Disperdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Paket	7.500.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000,00	125.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Paket	125.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Paket	10.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Disperdagin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.000.000,00	130.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Paket	80.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	20.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	APBD Kab. Bandung	20 Laporan	20.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab. Bandung	80 Laporan	150.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**47.500.000,00**	**47.500.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**100%**	**47.500.000,00**	**Disperdagin**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Unit	37.500.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Unit	5.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Unit	5.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase pelayanan operasional perkantoran**	**100%**	**2.723.164.000,00**	**4.605.045.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**100%**	**2.456.004.000,00**	**Disperdagin**
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	183.604.000,00	215.485.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	183.604.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	5.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.534.560.000,00	4.384.560.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Laporan	2.267.400.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**265.100.000,00**	**265.100.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**100%**	**265.100.000,00**	**Disperdagin**
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	APBD Kab. Bandung	10 Unit	40.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	APBD Kab. Bandung	12 Unit	70.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung	2 Unit	5.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	APBD Kab. Bandung	8 Unit	25.000.000,00	Disperdagin
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.100.000,00	125.100.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Unit	125.100.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Disperdagin**		**100%**	**180.000.000,00**	**413.341.960,00**	**APBD Kab. Bandung**	**100%**	**180.000.000,00**	**Disperdagin**
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	180.000.000,00	413.341.960,00	APBD Kab. Bandung	2 Orang/Bulan	180.000.000,00	Disperdagin
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL**	**Disperdagin**					**APBD Kab. Bandung**			**Disperdagin**
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Disperdagin**	**Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola**	**80%**	**268.900.000,00**	**268.900.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**100%**	**268.900.000,00**	**Disperdagin**
3.29.05.2.01	**PenatausahaanIzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan**	**80%**	268.900.000,00	268.900.000,00	APBD Kab. Bandung	**100%**	268.900.000,00	**Disperdagin**
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	50.000.000,00	Disperdagin
3.29.05.2.01.02	Penyusunan RekomendasiPerizinan dan Informasi IzinPemanfaatan	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan	2 Dokumen	168.900.000,00	168.900.000,00	APBD Kab.	2 Dokumen	168.900.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota		Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota				Bandung			
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan PengawasanPelaksanaan PerizinanPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Laporan	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	17 Laporan	**50.000.000,00**	Disperdagin
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN**	**Disperdagin**					**APBD Kab. Bandung**			**Disperdagin**
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Disperdagin**	**Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin**	**75%**	**233.500.000,00**	**233.500.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**80%**	**233.500.000,00**	**Disperdagin**
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan**	**Disperdagin**	**Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin**	**75%**	203.500.000,00	203.500.000,00	APBD Kab. Bandung	**80%**	203.500.000,00	**Disperdagin**
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan melalui SistemPelayanan Perizinan	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui	1 Dokumen	**203.500.000,00**	**203.500.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	1 Dokumen	**203.500.000,00**	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik		Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda DaftarGudang**	**Disperdagin**	**Persentase gudang yang memiliki tanda daftar**	**25%**	15.000.000,00	15.000.000,00	APBD Kab. Bandung	**30%**	15.000.000,00	**Disperdagin**
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang	Disperdagin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	1 Dokumen	**15.000.000,00**	Disperdagin
3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba (STPW)untuk Penerima Waralaba dariWaralaba Dalam Negeri**	**Disperdagin**	**Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW**	**10%**	15.000.000,00	15.000.000,00	APBD Kab. Bandung	**10%**	15.000.000,00	**Disperdagin**
3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Disperdagin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	1 Dokumen	**15.000.000,00**	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Disperdagin**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar**	**23%**	**1.766.064.000,00**	**2.766.064.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**25%**	**1.834.104.000,00**	**Disperdagin**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan**	**Disperdagin**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	**70%**	1.678.564.000,00	2.678.564.000,00	APBD Kab. Bandung	**75%**	1.746.604.000,00	**Disperdagin**
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.569.114.000,00	2.569.114.000,00	APBD Kab. Bandung	3 Unit	1.637.154.000,00	Disperdagin
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	**109.450.000,00**	**109.450.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	11 Unit	**109.450.000,00**	Disperdagin
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Disperdagin**	**Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar**	**10%**	87.500.000,00	87.500.000,00	APBD Kab. Bandung	**13%**	87.500.000,00	**Disperdagin**
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	**87.500.000,00**	**87.500.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	1 Dokumen	**87.500.000,00**	Disperdagin
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Disperdagin**	**Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu**	**3%**	**876.960.000,00**	**2.106.960.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**3%**	**945.000.000,00**	**Disperdagin**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota**	**Disperdagin**	**Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**53%**	131.960.000,00	131.960.000,00	APBD Kab. Bandung	**54%**	200.000.000,00	**Disperdagin**
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan SinkronisasiPeningkatan AksesibilitasBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	**131.960.000,00**	**131.960.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	1 Laporan	**200.000.000,00**	Disperdagin
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING**	**0,89**	720.000.000,00	1.950.000.000,00	APBD Kab. Bandung	**0,89**	720.000.000,00	**Disperdagin**
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	APBD Kab. Bandung	12 Laporan	25.000.000,00	Disperdagin
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PasarRakyat yang	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	APBD Kab. Bandung	12 Laporan	25.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Terintegrasi dalamSistem Informasi Perdagangan		Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	**670.000.000,00**	**1.900.000.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	1 Laporan	**670.000.000,00**	Disperdagin
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer**	**90%**	25.000.000,00	25.000.000,00	APBD Kab. Bandung	**90%**	25.000.000,00	**Disperdagin**
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	12 Laporan	**25.000.000,00**	Disperdagin
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Disperdagin**	**Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas**	**$ 727.287.122**	**436.378.000,00**	**436.378.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**$ 727.432.463**	**436.378.000,00**	**Disperdagin**
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan**	**3%**	436.378.000,00	436.378.000,00	APBD Kab. Bandung	**3%**	436.378.000,00	**Disperdagin**
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab.	4 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Bandung			
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	75.000.000,00	75.000.000,00	APBD Kab. Bandung	5 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Disperdagin
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab. Bandung	3 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Disperdagin
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra ProdukEkspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15 Produk	**61.378.000,00**	**61.378.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	15 Produk	**61.378.000,00**	Disperdagin
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Disperdagin**	**Persentase Alat UTTP sesuai standar**	**95%**	**454.747.000,00**	**454.747.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**100%**	**522.787.000,00**	**Disperdagin**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan**	**Disperdagin**	**Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah**	**95%**	454.747.000,00	454.747.000,00	APBD Kab. Bandung	**100%**	522.787.000,00	**Disperdagin**
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5000 Unit	206.960.000,00	206.960.000,00	APBD Kab. Bandung	5000 Unit	275.000.000,00	Disperdagin
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	**247.787.000,00**	**247.787.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	200 Orang	**247.787.000,00**	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Disperdagin**	**Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran**	**35%**	**150.000.000,00**	**500.000.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**42%**	**150.000.000,00**	**Disperdagin**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri**	**Disperdagin**	**Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk unggulan Kabupaten Bandung**	**80%**	150.000.000,00	500.000.000,00	APBD Kab. Bandung	**100%**	150.000.000,00	**Disperdagin**
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	75.000.000,00	425.000.000,00	APBD Kab. Bandung	40 UMKM	75.000.000,00	Disperdagin
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40 UMKM	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	40 UMKM	**75.000.000,00**	Disperdagin
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN**	**Disperdagin**					**APBD Kab. Bandung**			**Disperdagin**
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Disperdagin**	**Persentase pembangunan sumberdaya industri**	**80%**	**3.956.960.000,00**	**4.978.054.340,00**	**APBD Kab.**	**100%**	**2.525.000.000,00**	**Disperdagin**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten				**Bandung**			
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Jumlah dokumen rencana pembangunan industri**	**5 Dokumen**	3.956.960.000,00	4.978.054.340,00	APBD Kab. Bandung	**5 Dokumen**	2.525.000.000,00	**Disperdagin**
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	150.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1.493.304.500,00	2.459.621.800,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	150.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.675.000.000,00	1.675.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	1.675.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	1 Dokumen	468.655.500,00	468.655.500,00	APBD Kab.	1 Dokumen	380.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat		Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				Bandung			
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	150.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.07	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	5.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Disperdagin	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	5.000.000,00	59.777.040,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	5.000.000,00	Disperdagin
3.31.02.2.01.09	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	5.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.02.2.01.10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	-	**-**	Disperdagin
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Disperdagin**	**Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin**	**12,50%**	**281.960.000,00**	**401.960.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	**15,00%**	**350.000.000,00**	**Disperdagin**
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah**	**20 Perusahaan**	281.960.000,00	401.960.000,00	APBD Kab. Bandung	**20 Perusahaan**	350.000.000,00	**Disperdagin**
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi	1 Dokumen	131.960.000,00	131.960.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	200.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			kewenangan pemerintah pusat							
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Disperdagin	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	**150.000.000,00**	**270.000.000,00**	**APBD Kab. Bandung**	1 Dokumen	**150.000.000,00**	Disperdagin
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Disperdagin**	**Persentase pelaporan SIINAS**	**20%**	**850.000.000,00**	**850.000.000,00**	**APBD Kab.**	**20%**	**850.000.000,00**	**Disperdagin**

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
							Bandung			
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industriuntuk Informasi Industri untukIUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri**	**20%**	850.000.000,00	850.000.000,00	APBD Kab. Bandung	**20%**	850.000.000,00	**Disperdagin**
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis DataIndustri, Data Kawasan Industriserta Data Lain LingkupKabupaten/Kota melalui SistemInformasi Industri Nasional(SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	150.000.000,00	Disperdagin
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa IndustriKabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	APBD Kab. Bandung	1 Dokumen	650.000.000,00	Disperdagin
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	APBD Kab.	1 Dokumen	50.000.000,00	Disperdagin

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Penanggung Jawab
				Target Capaian	Rancangan	Penetapan		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	LingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data ke SIINas		Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				Bandung			
	Jumlah Total				46.713.593.000,00	52.599.910.300,00			43.967.591.000,00	

Soreang, 15 Juli 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung	Verifikator JFT Perencana Muda	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Air
DICKY ANUGRAH. SH., M.Si	**PUNI SERUNI**	**DADAN WARDHANA, STP, MPP, MT.**
NIP: 19740717 199803 1 003	NIP :19790912 200501 2 008	NIP: 19800327 200501 1 012

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Jawa Barat, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian	Penetapan
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**	**Disperdagin**	**Nilai AKIP**	**86 Poin**	**39.603.346.960,00**
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD**	**100%**	**517.240.000,00**
3.30.01.2.01.01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	159.850.000,00

3.30.01.2.01.02	Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.01.2.01.03	Koordinasi dan PenyusunanDokumen Perubahan RKASKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.01.2.01.04	Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.01.2.01.05	Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD	Disperdagin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
3.30.01.2.01.06	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	94.350.000,00
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Disperdagin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	80.000.000,00
3.30.01.2.01.08	Penyelengaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	75.540.000,00
3.30.01.2.01.09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoran Daerah	Disperdagin	Jumlah Data Statitstik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Pemerintah Daerah	60 Data	72.500.000,00
3.30.01.2.02	**Administrasi KeuanganPerangkat Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu** **Persentase laporan pertanggungjawaban**	**100%**	**33.277.620.000,00**

			keuangan sesuai ketentuan		
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/Bulan	33.238.620.000,00
3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.000.000,00
3.30.01.2.02.06	Pengelolaan dan PenyiapanBahan Tanggapan Pemeriksaan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00
3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	14.000.000,00
3.30.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase Barang milik daerah yang telah direkonsiliasi**	**100%**	**5.000.000,00**
3.30.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Disperdagin**	**Persentase ketersediaan operasional perkantoran**	**100%**	**472.500.000,00**
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor	Disperdagin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000,00
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.000.000,00
3.30.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disperdagin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disperdagin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Disperdagin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	130.000.000,00

3.30.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000,00
3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disperdagin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	20.000.000,00
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	150.000.000,00
3.30.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase pengadaan barang milik daerah**	**100%**	**47.500.000,00**
3.30.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disperdagin	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	37.500.000,00
3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00
3.30.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000,00
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase pelayanan operasional perkantoran**	**100%**	**4.605.045.000,00**
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	215.485.000,00
3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00
3.30.01.2.08.04	Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Disperdagin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.384.560.000,00
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Disperdagin**	**Persentase barang milik daerah yang dipelihara**	**100%**	**265.100.000,00**
3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasJabatan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	40.000.000,00
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan	Disperdagin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	12 Unit	70.000.000,00

	DinasOperasional atau Lapangan		dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
3.30.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Disperdagin	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	5.000.000,00
3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Disperdagin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	25.000.000,00
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/RehabilitasiGedung Kantor dan BangunanLainnya	Disperdagin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.100.000,00
3.30.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Disperdagin**		**100%**	**413.341.960,00**
3.30.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Disperdagin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	413.341.960,00
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL**	**Disperdagin**			
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Disperdagin**	**Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola**	**80%**	**268.900.000,00**
3.29.05.2.01	**Penatausahaan IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase pemanfaatan potensi uap panas bumi yang dimanfaatkan**	**80%**	268.900.000,00
3.29.05.2.01.01	Penetapan Prosedur danPersyaratan Izin PemanfaatanLangsung Panas Bumi dalamDaerah Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000,00
3.29.05.2.01.02	Penyusunan RekomendasiPerizinan dan Informasi IzinPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	168.900.000,00
3.29.05.2.01.03	Pengendalian dan PengawasanPelaksanaan PerizinanPemanfaatan Langsung PanasBumi dalam DaerahKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	17 Laporan	**50.000.000,00**
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERDAGANGAN**	**Disperdagin**			
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Disperdagin**	**Persentase perusahaan**	**75%**	**233.500.000,00**

			perdagangan yang sudah berizin		
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan**	**Disperdagin**	**Persentase pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang memiliki izin**	**75%**	203.500.000,00
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan melalui SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik	Disperdagin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	**203.500.000,00**
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda DaftarGudang**	**Disperdagin**	**Persentase gudang yang memiliki tanda daftar**	**25%**	15.000.000,00
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan TandaDaftar Gudang	Disperdagin	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	**15.000.000,00**
3.30.02.2.03	**Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba (STPW)untuk Penerima Waralaba dariWaralaba Dalam Negeri**	**Disperdagin**	**Persentase waralaba dalam negeri yang diterbitkan STPW**	**10%**	15.000.000,00
3.30.02.2.03.04	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba dalam negeri dan pnerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Disperdagin	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	1 Dokumen	**15.000.000,00**
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Disperdagin**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar**	**23%**	**2.766.064.000,00**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan PengelolaanSarana Distribusi Perdagangan**	**Disperdagin**	**Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola**	**70%**	2.678.564.000,00
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana DistribusiPerdagangan	Disperdagin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	2.569.114.000,00
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	**109.450.000,00**

3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap PengelolaSarana Distribusi PerdaganganMasyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Disperdagin**	**Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar**	**10%**	87.500.000,00
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan PengendalianPengelola Sarana DistribusiPerdagangan	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	**87.500.000,00**
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Disperdagin**	**Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu**	**3%**	**2.106.960.000,00**
3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan BarangPenting di Tingkat DaerahKabupaten/ Kota**	**Disperdagin**	**Persentase pemenuhan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	**53%**	131.960.000,00
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan SinkronisasiPeningkatan AksesibilitasBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat Agendan Pasar Rakyat	Disperdagin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 Laporan	**131.960.000,00**
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting di Tingkat PasarKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase updating data harga dan Stok pada SIBAPOKTING**	**0,89**	1.950.000.000,00
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	25.000.000,00
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan StokBarang Kebutuhan Pokok danBarang Penting pada PasarRakyat yang Terintegrasi dalamSistem Informasi Perdagangan	Disperdagin	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	25.000.000,00
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khusus yangBerdampak dalam 1 (satu)Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	**1.900.000.000,00**

3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi di TingkatDaerah Kabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Tingkat Distributor ke Pengecer**	**90%**	25.000.000,00
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Disperdagin	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	12 Laporan	**25.000.000,00**
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Disperdagin**	**Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas**	**$ 727.287.122**	**436.378.000,00**
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan PromosiDagang melalui PameranDagang dan Misi Dagang bagiProduk Ekspor Unggulan yangterdapat pada 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk Ekspor unggulan**	**3%**	436.378.000,00
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	150.000.000,00
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	5 Pelaku Usaha	75.000.000,00
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi ProdukEkspor Unggulan	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	3 Pelaku Usaha	150.000.000,00
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra ProdukEkspor	Disperdagin	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	15 Produk	**61.378.000,00**
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Disperdagin**	**Persentase Alat UTTP sesuai standar**	**95%**	**454.747.000,00**
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang, danPengawasan**	**Disperdagin**	**Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah**	**95%**	454.747.000,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Ulang	Disperdagin	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5000 Unit	206.960.000,00
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal	Disperdagin	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	**247.787.000,00**
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Disperdagin**	**Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran**	**35%**	**500.000.000,00**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri**	**Disperdagin**	**Persentase promosi dan pemasaran penggunaan produk**	**80%**	500.000.000,00

			unggulan Kabupaten Bandung		
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40 UMKM	425.000.000,00
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	40 UMKM	**75.000.000,00**
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN**	**Disperdagin**			
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Disperdagin**	**Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten**	**80%**	**4.978.054.340,00**
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan EvaluasiRencana Pembangunan IndustriKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Jumlah dokumen rencana pembangunan industri**	**5 Dokumen**	4.978.054.340,00
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan KebijakanPercepatan Pengembangan,Penyebaran dan PerwilayahanIndustri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, danpelaksanaan PembangunanSumber Daya Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	2.459.621.800,00
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1.675.000.000,00
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	468.655.500,00
3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap PelaksanaanRencana Pembangunan Industri	Disperdagin	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana	1 Dokumen	150.000.000,00

			Pembangunan Industri		
3.31.02.2.01.07	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00
3.31.02.2.01.08	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Disperdagin	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	59.777.040,00
3.31.02.2.01.09	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	5.000.000,00
3.31.02.2.01.10	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Disperdagin	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Dokumen	**5.000.000,00**
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Disperdagin**	**Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin**	**12,50%**	**401.960.000,00**
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri(IUI), Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) dan IzinPerluasan Kawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Jumlah rekomendasi izin industri kecil dan menengah**	**20 Perusahaan**	401.960.000,00
3.31.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Disperdagin	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	131.960.000,00
3.31.03.2.01.04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian	Disperdagin	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan	1 Dokumen	**270.000.000,00**

	dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Disperdagin**	**Persentase pelaporan SIINAS**	**20%**	**850.000.000,00**
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industriuntuk Informasi Industri untukIUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota**	**Disperdagin**	**Persentase perusahaan yang mendapatkan informasi sektor industri**	**20%**	850.000.000,00
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan Analisis DataIndustri, Data Kawasan Industriserta Data Lain LingkupKabupaten/Kota melalui SistemInformasi Industri Nasional(SIINas)	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	150.000.000,00
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa IndustriKabupaten/Kota melalui SIINas	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	650.000.000,00
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industridan Perusahaan KawasanIndustri LingkupKabupaten/Kota	Disperdagin	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	1 Dokumen	50.000.000,00

	dalamPenyampaian Data ke SIINas		dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025 ini membutuhkan total dana sebesar Rp 52.599.910.300,00 untuk melaksanakan 11 program, 23 kegiatan, dan 70 sub kegiatan.

Penyusunan rencana ini didasarkan pada analisis kebutuhan dan prioritas program yang telah dilakukan. Diharapkan dengan adanya rencana ini, program-program yang tercantum dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB V

P E N U T U P

Dengan adanya Penetapan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung diharapkan prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penetapan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Dalam kaitan ini maka kerja sama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (PENETAPAN RENCANA KERJA- Perangkat Daerah) Tahun 2025.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengevaluasi pelaksanaan Penetapan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dan Kepala Perangkat Daerah mengevaluasi program – program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Gubernur Jawa Barat.

Penyusunan Penetapan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Penetapan Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerja sama yang sinergis

Soreang, 15 Juli 2024

KEPALA DINAS

PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

KABUPATEN BANDUNG

TTD

DICKY ANUGRAH

BUPATI BANDUNG

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA